



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023

KOTABARU

KATA PENGANTAR

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 disusun dalam rangka untuk memenuhi pencapaian target kinerja pada tahun yang akan datang. Rencana Renja ini nantinya sebagai bahan acuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2023 dalam rangka mendukung Visi Pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu dasar dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah. Untuk Visi Kepala Daerah yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang Semakin Mandiri dan Sejahtera melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisata”. Sedangkan Misi Kepala Daerah yang berkaitan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yaitu “Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan”

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, namun diharapkan bermanfaat sesuai peruntukannya.

Kotabaru, Agustus 2023

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru



Ir. H. HARDHANI, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650401 199308 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	4
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	7
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat RKPD	9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	1
BAB IV PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

Halaman

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021	12
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	26
2.3	Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2023	52
2.4	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	68

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan	77
3.2	Tujuan, Sasaran dan Strategis	80

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1.	Rumusan dan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	88
------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

a. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SOPD	2
b. Keterkaitan Renja dengan Dokumen Lainnya	3

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023
2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 tabel 4.1
3. RKA Pendapatan

BAB I

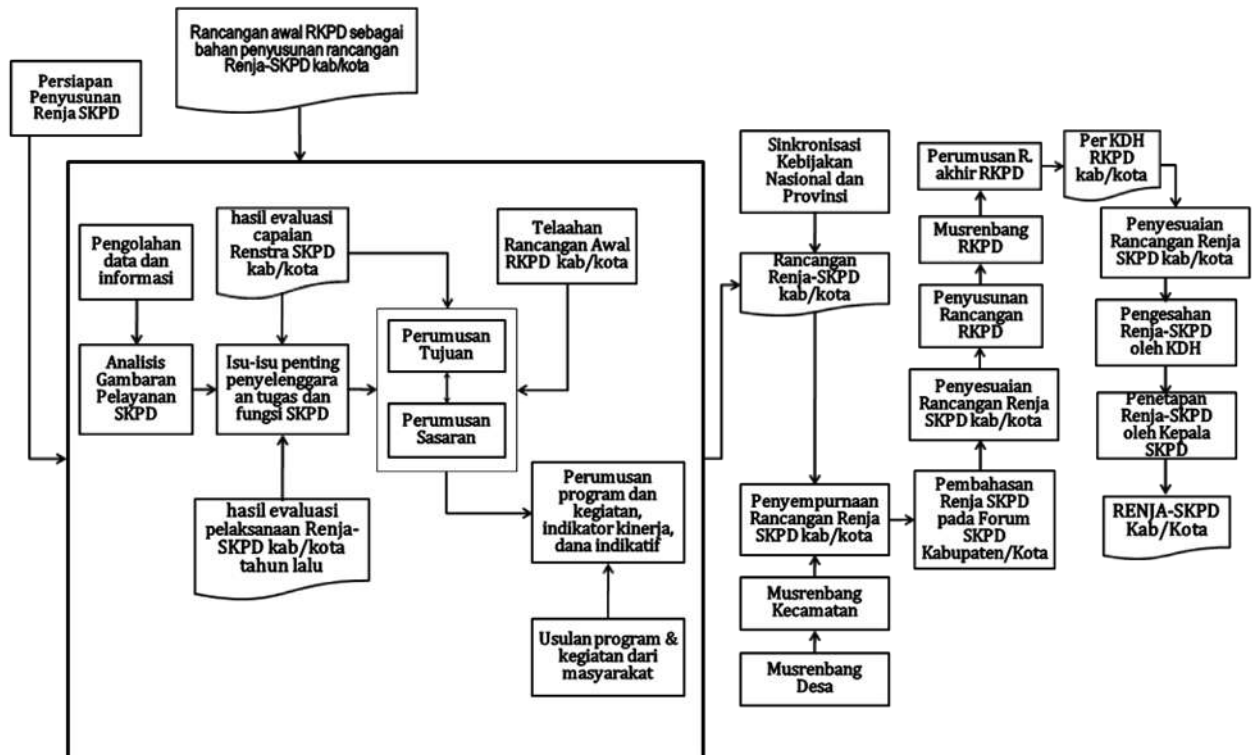
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

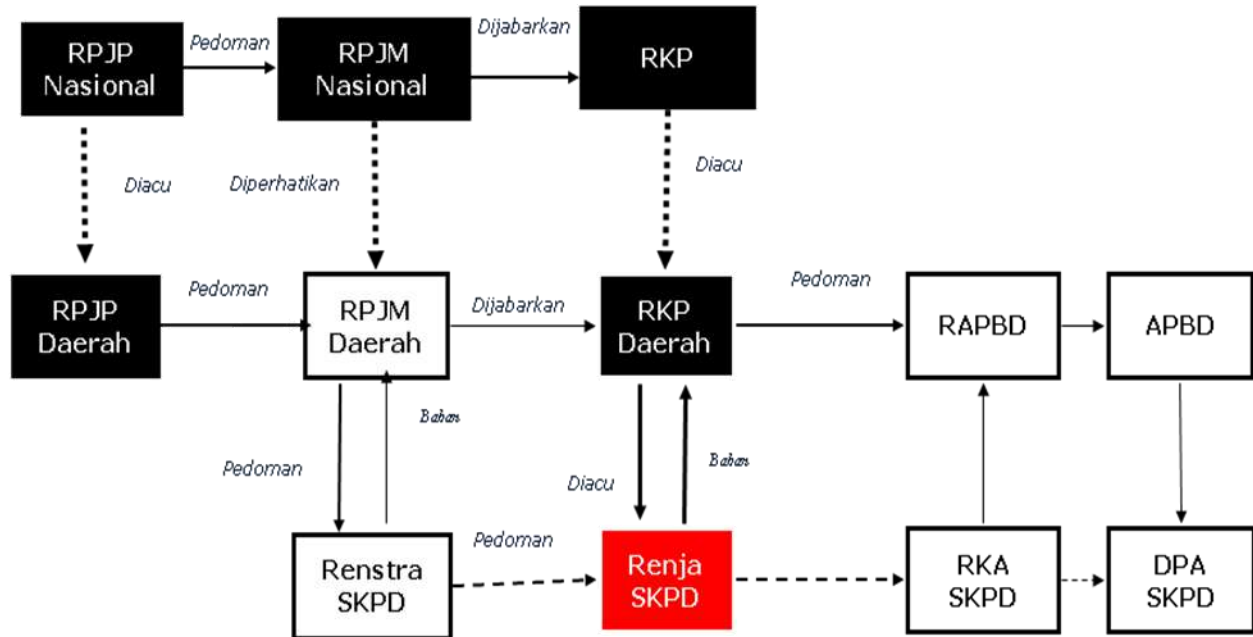
Penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru. Sebagai subsistem dari perencanaan pembangunan daerah, maka penyusunannya mengacu kepada Rencana Strategik (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang mana Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru tahun yang telah disahkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan sistem tersebut diatas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : 8 tahun 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah, dituntut untuk mendukung pencapaian ***Visi Pemerintah Daerah yaitu : Terwujudnya Masyarakat Kotabaru yang Semakin Mandiri dan Sejahtera melalui Peningkatan di Bidang Agrobisnis dan Kepariwisata***”

a. Bagan alir tahapan penyusunan Renja SOPD dapat dilihat dari bagan berikut ini.



b. Keterkaitan Renja dengan dokumen lainnya dapat dilihat dari bagan berikut ini.



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 175 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 1876);
30. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 138);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Merumuskan tujuan, strategis, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparat dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas – prioritas di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sehingga program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Tujuan penyusunan Penetapan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Mempermudah pengendalian serta pelaksanaan arah pembinaan baik secara internal maupun secara eksternal.
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.3. Review terhadap Perubahan Renja Kerja Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap rancangan RKPD)

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP,

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 adalah 12 (Dua Belas) program / kegiatan berhasil, telah memenuhi target kinerja (rentang capaian 91 s/d 100%) yaitu :

1. Program Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Realisasi kinerja 99,07% dan realisasi keuangan sebesar 90,96%
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan Realisasi kinerja 90,03% dan realisasi keuangan sebesar 81,00%
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,37%
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,52%
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,92%
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Realisasi kinerja 96,93% dan realisasi keuangan sebesar 95,10%
7. Program Pengembangan UMKM dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,32%
8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,64%
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,02%
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 87,21%

11. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan Realisasi kinerja 99,61% dan realisasi keuangan sebesar 88,09%
12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Realisasi kinerja 99,69% dan realisasi keuangan sebesar 95,75%
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan Realisasi kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,41%

Sedangkan untuk program / kegiatan cukup berhasil, telah memenuhi target kinerja (rentang capaian 80 s/d 91%) yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan Realisasi kinerja 90,03% dan realisasi keuangan sebesar 81,00%. Program ini cukup berhasil karena ada kegiatan yang melibatkan pihak ketiga yang aturan tidak cukup jelas sehingga tidak dilaksanakan karena akan bermasalah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu didasarkan atas perbandingan realisasi kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan). Hasil perbandingan realisasi kinerja dengan rencana kinerja disimpulkan pada empat kategori capaian, yakni sangat berhasil (rentang capaian lebih dari 100%), berhasil (rentang capaian 91 s/d 100 %), cukup berhasil, (rentang capaian 81s/d 90 %), kurang berhasil (rentang capaian kurang dari 80 %).

Capaian kinerja pelayanan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan ada sebagian melebihi target kinerja yang ditentukan tetapi ada juga yang belum mencapai target yang telah ditentukan sebagaimana keterangan dibawah ini :

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021

No	Nama Indikator	Penanggung Jawab	Rata-Rata Capaian %	Kategori Capaian
1	Persentase Koperasi Aktif	Kabid Koperasi	81	Cukup Berhasil
2	Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil	Kabid Usaha Mikro	100	Berhasil
3	Persentase industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	Kabid Perindustrian	100	Berhasil
4	Persentase Fasilitasi Koperasi yang memiliki Perizinan Usaha	Kabid Koperasi	0	-
5	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Kabid Koperasi	127	Sangat Berhasil
6	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Kabid Koperasi	100	Berhasil
7	Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kabid Koperasi	100	Berhasil
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Kabid Koperasi	100	Berhasil
9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Kabid Usaha Mikro	100	Berhasil
10	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	Kabid Usaha Mikro	100	Berhasil
11	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	100	Berhasil
12	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	100	Berhasil
13	Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	100	Berhasil
14	Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	0	-
15	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar	Kabid Kemetrolgian	100	Berhasil
16	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	0	-
17	Persentase Pertumbuhan IKM	Kabid Perindustrian	100	Berhasil
18	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Kabid Perindustrian	0	-
19	Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	Kabid Perindustrian	100	Berhasil

Selain kinerja pelayanan di atas ada juga kinerja pelayanan untuk mengumpulkan pendapatan dan menyetorkan ke kas daerah dari hasil pengelolaan retribusi yang ada (berupa Retribusi jasa umum meliputi pelayanan persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar-kios, Retribusi

Pengujian alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya sedangkan Retribusi jasa usaha meliputi Retribusi pemakaian kekayaan Daerah dan Retribusi pasar grosir/pertokoan serta retribusi paker/penitipan kendaraan bermotor) untuk pengelolaan hasil pendapatan retribusi daerah diserahkan ke kas daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kotabaru.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang tertuang dalam Renstra adalah

1. Koperasi aktif diprioritaskan sebagai target sasaran dalam peningkatan daya saing dan peningkatan kelembagaan Koperasi
2. Perkuatan Kompetensi pelaku usaha, khususnya dalam aspek berwirausaha, produktivitas, adaptasi, teknologi dan daya saing
3. Kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB relative masih rendah
4. Perlunya peningkatan penyediaan bahan, infrastruktur, pelatihan, operasional rumah kemasan
5. Sumberdaya manusia dunia usaha yang masih belum menunjukkan semangat wirausaha yang tinggi dalam mengelola dan mengembangkan usahanya;
6. Tuntutan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien dan murah, yang didukung dengan sarana prasarana perdagangan;
7. Semakin terbukanya arus informasi dan modernisasi yang mengharuskan setiap aparatur meningkatkan kualitas dan kapasitasnya sebagai pelayan masyarakat;
8. Diberlakukannya pasar bebas China-Asean atau yang lebih dikenal dengan China Asean Free Trade Area (CAFTA) mulai tahun 2010, yang mengharuskan produk barang dan jasa para pelaku usaha dalam negeri dapat bersaing dengan produk-produk China;

Perlu ada komitmen bersama dalam memberikan peningkatan pelayanan di bidang perkoperasian, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan criteria standart yang objektif dan transparan.

Permasalahan dan hambatan yang merupakan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Kendala Internal
 - a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur Pembina
 - b. Terbatasnya sarana mobilitas
 - c. Terbatasnya anggaran pembinaan
2. Kendala Eksternal

- a. Terbatasnya kualitas SDM Koperasi, Usaha Kecil dan Industri
- b. Terbatasnya akses permodalan
- c. Terbatasnya akses pasar dan kemitraan

Dampak kendala terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program adalah kurang optimalnya penyelenggaraan Program pembangunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan SKPD sangat terkait dengan beberapa isu penting baik internal maupun eksternal, antara lain.

➤ Isu-isu Internal :

1. Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, karena ketersediaan SDM yang memiliki skil, keahlian dan pengetahuan terhadap pekerjaan akan sangat menentukan kualitas kebijakan dan pelayanan publik SKPD. Kondisi SDM Dinas Perdagangan tidak memiliki tenaga ahli dibidang pembangunan dan pengadaan barang dan jasa terkecuali dibidang kemetrolagian
2. Memiliki tingkat responsibilitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan belum sebanding dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Iklim dan budaya kerja yang terbangun dilingkungan SKPD. Ini merupakan salah satu faktor pendorong (positif) atau justru sebaliknya menjadi penghambat (negatif) dalam pencapaian kinerja SKPD. Sejauh ini iklim dan budaya kerja dilingkungan Dinas perdagangan cukup kondusif dalam mendukung pencapaian kinerja SKPD, meskipun belum sepenuhnya optimal.
4. Sarana dan prasarana pendukung. Kedudukan sarana dan prasarana hampir sama pentingnya dengan ketersediaan SDM yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Dinas Perdagangan masih sangat terbatas.
5. Koordinasi yang terbangun di lingkungan Dinas Perdagangan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

➤ Isu-isu Eksternal :

1. Isu strategis di bidang perdagangan adalah belum baiknya system distribusi barang dan jasa serta masih rendahnya akses pasar luar negeri. Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Belum membaiknya system distribusi barang ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi), belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen, serta terbatasnya sarana penyimpanan di tingkat produksi. Demikian halnya dengan kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis. Disamping itu, permasalahan lainnya yang perlu memperoleh perhatian adalah masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen. Sedangkan rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk market intelegent), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.

Beberapa isu-isu penting tersebut diatas merupakan tantangan sekaligus peluang yang menjadi starting point juga sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kepala daerah yang terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten kotabaru Tahun 2021 – 2026.

Tujuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang jujur, responsif, terbuka, akuntabel, transparan dan baik
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sektor Usaha Mikro Kecil
3. Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan berbasis produk lokal

Untuk Mewujudkan tujuan ,dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

2. Meningkatkan tata kelola organisasi yang efisien transparansi dalam mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas
3. Meningkatkan pengembangan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil
4. Meningkatkan sarana prasarana perdagangan dan pelayanan kemitrologian
5. Meningkatkan kualitas industri kecil pengolahan berbasis produk lokal

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, industri, sarana prasarana perdagangan dan Kemitrologian adalah meningkatkan peluang pasar, kewirausahaan dan kemitraan pada sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian maupun meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur Pembina, pengadaan sarana mobilitas, meningkatkan anggaran pembinaan.

Rekomendasi strategis untuk pencapaian program dan kegiatan adalah meningkatkan kualitas SDM Koperasi, Usaha Kecil dan Industri, memperluas akses permodalan, pasar dan kemitraan, dalam upaya pengembangan berbagai bentuk usaha, manajemen dan kelembagaan usaha, menuju peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi meningkatnya jumlah anggota dan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat demikian juga peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur Pembina, penyediaan sarana mobilitas dan anggaran yang proporsional.

A. Daftar Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru

No	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT	KET
1	Ir.H.HARDHANI ,M.Si NIP. 19650401 199308 1 001	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pembina Utama Muda (IV / c)	
2	JURAINAH, SE.,MM NIP. 19740829 200312 2 005	Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Pembina (IV/a)	
3	ARY MARDANI,ST.MT NIP. 19790422 200312 1 008	Kabid Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan Pembina (IV/a)	
4	FATHURRAHMAN FADIL ST.MT Nip. 19730706 200312 1 009	Kabid Kemitrologian dan Pengawasan Perdagangan Pembina (IV/a)	
5	Drs.YUSUF PALINDANG, MM NIP. 19670101 200604 1 027	Kabid Koperasi Pembina (IV/a)	
6		Kabid UKM Pembina (IV/a)	
7	JONI FAHAMSYAH, ST NIP. 19770721 2011011 001	Kabid Perindustrian	
8		Pengawas Koperasi	
9		Pengawas Koperasi	
10		Kasubag Keuangan	
11		Pengawas Perdagangan	
12	H. AGUS NADI,S.AP.,MM NIP. 19690804 199002 1 001	Pengawas Koperasi Penata Tk. I (III/d)	
13	HAIRIL ANWAR S.Pi.,MM NIP. 19750304 200701 1 014	Kasubag Perencanaan Pembina (IV/a)	
14		Penyuluh perindustrian dan perdagangan	

15		Penyuluh perindustrian dan perdagangan	
16	PUKAMA, SE NIP. 19700616 199303 2 008	Penguji Mutu Barang Penata Tk.1 (III/d)	
17	HJ. YULIANI EMBARINA GINTING, SE NIP. 19800723 200901 2 004	Pengawas Koperasi Penata Tk.1 (III/d)	
18	SYARIFAH FATIMAH, Amd NIP. 19760812 200312 2 006	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Penata (III/c)	
19		Analisis Kebijakan Ahli muda	
20	ST.HARLIAH, SE NIP. 19660530 200604 2 006	Analisis Bimbingan Usaha pada Bidang Koperasi Penata (III/c)	
21	NURMASITAH,S.Ag NIP. 19770628 200801 2 014	Analisis Teknologi Industri Penata (III/c)	
22	RAKHMANNI,BcKN NIP. 19660509 200701 1 016	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Penata Muda Tk. 1 (III/b)	
23	AKHLIS AKHYARI,ST NIP. 19810209 201403 1 001	Penera Bidang Metrologi dan Pengawasan Perdagangan Penata Muda Tk. 1 (III/b)	
24	NADIA PRATIWI,S.Si NIP. 19930902 201503 2 002	Penera Bidang Metrologi dan Pengawasan Perdagangan Penata Muda Tk.1 (III/b)	
25	MASHURI ROSYADI,SE NIP. 19840807 200312 1 006	Penyusun Laporan Keuangan pada Subbag Keuangan Penata Muda Tk. 1 (III/b)	
26	SYAFRUDDIN NOOR,SE NIP. 19720601 200604 1 026	Analisis Pengawas Mutu Produk pada Bidang Perindustrian Penata Muda Tk.1 (III/b)	
27	RABYATUL PAJERI NIP. 19790306 201001 1 013	Bendahara Penerimaan pada Subbag Keuangan Penata Muda (III/a)	
28	ROSMAWATI NIP. 19791108 200801 2 013	Fasilitator Promosi ada Bidang Usaha Mikro Penata muda Penata Muda (III/a)	
29	ARIYANI,SE NIP. 19810528 200801 2 019	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar pada Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan Penata Muda (III/a)	
30	JANATUL ADAWIYAH NIP. 19841005 200901 2 001	Bendahara Pengeluaran pada Subbag Keuangan Penata Muda (III/a)	
31	SYARIPUDINNOOR,SE NIP. 19770905 200701 1 010	Penelaah Pengembangan Usaha pada Bidang Usaha Mikro Penata Muda (III/a)	
32	NUR ADITYA LESTARI, SE NIP. 19960813 201903 2 006	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro Penata Muda (III/a)	
33	UNTUNG WALUYO. S.T Nip. 19910707 202012 1 008	Penera pada Bidang Metrologi dan Pengawasan Perdagangan Penata Muda (III / a)	
34	MUSYAFIRAH NIP. 19660403 200701 2 009	Pengelola Dokumen Perizinan pada Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan Penata Muda (III / a)	
35	SAMSIR ALAM NOOR NIP. 19690715 200701 1 039	Pengelola Penagihan dan Pengawasan pada Subbag Keuangan Pengatur Tk. I (II / d)	
36	SUBRIANSYAH NIP. 19700304 200701 1 030	Pengelola Penagihan dan Pengawasan pada Subbag Keuangan Pengatur Tk.1 (II/d)	
37	SITI HIDAYAH NIP. 1970083 200701 2 016	Pengelola Keuangan pada Subbag Keuangan Pengatur Tk. I (II / d)	
38	MOHD. IKHSAN NIP. 19750801 200701 1 014	Pengelola Distribusi dan Pemasaran Pengatur Tk.1 (II/d)	
39	SYAHRIADI NIP. 19760412 200701 1 022	Pengelola Fasilitas dan Perlindungan Konsumen pada Bidang Metrologi dan Pengawasan Perdagangan Pengatur Tk. I (II / d)	
40	MUHAMMAD ROHADI NIP. 19750624 200801 1 012	Pengelola Fasilitas dan Perlindungan Konsumen pada Bidang Metrologi dan Pengawasan Perdagangan Pengatur Tk.1 (II / d)	
41	IRWAN NOOR NIP. 19730707 201001 1 009	Pengelola Penagihan dan Pengawasan pada Subbag Keuangan Pengatur (II / c)	
42	DARMANSYAH NIP. 19761217 200701 1 007	Pengelola Penagihan dan Pengawasan pada Subbag Keuangan Pengatur (II / c)	
43	PUTRI HAPSARI SIBAGARIANG, A.Md Nip. 19970305 202012 2 011	Penera Terampil pada Bidang Metrologi dan Pengawasan Perdagangan Pengatur (II / c)	
44	M. ISWAN NOOR NIP. 19790416 200604 1 017	Pengelola Dokumen Perizinan pada Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan Pengatur Tk.1 (II / d)	

45	SABRANSYAH NIP. 19761104 201001 1 010	Pengelola Dokumen Perizinan pada Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan Pengatur (II / c)	
46	NUR KUMALA NIP. 19700810 200701 2 020	Pengelola Keuangan pada Subbagian Keuangan Pengatur (II / c)	
47	YUDHI SAPUTRA NIP. 19800523 200701 1 009	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Subbag Umum dan Kepegawaian Pengatur (II / c)	
48	MAHDIAN NOOR NIP. 19800905 200801 1 013	Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop pada Bidang Koperasi Pengatur (II / c)	
49	AKHMAD YAMANI NIP. 19700428 200604 1 009	Pengadministrasi Umum pada Subbag Keuangan Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
50	NURUL MAHRITA, SE NIP. 19790927 201212 2 001	Pengelola Data Mutu dan Supervisi pada Bidang Perindustrian Pengatur (II/c)	
51	EGAH SURYA KISMADJA NIP. 19850219 201212 2 001	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor pada Subbag Umum dan Kepegawaian Pengatur (II/c)	
52	DARMAWAN NIP. 19660422 201212 2 001	Pengelola Penagihan dan Pengawasan pada Subbag Keuangan Pengatur (II/c)	
53	ARDIANSYAH NIP. 19700721 201001 1 004	Pengelola Distribusi dan Pemasaran pada Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan Pengatur (II/c)	
54	MUHAMMAD AKIB NIP. 19750810 201001 1 004	Pengelola Penagihan dan Pengawasan pada Subbag Keuangan Pengatur (II/c)	
55	MUHAMMAD GAFURI NIP. 19761212 200701 1 009	Pengadministrasi Umum pada Subbag Keuangan Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
56	MISRANSYAH NIP. 19780414 200901 1 009	Pengadministrasi Umum pada Subbag Keuangan Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
57	AHMAD ABD. RAHMAN NIP. 19850202 201001 1 018	Pengadministrasi Perizinan pada Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
58	HASAN BASRI NIP. 19740410 200701 1 018	Pengadministrasi Umum pada Subbag Keuangan Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
59	SABRAN NIP. 19750415 200701 1 021	Juru Pungut Retribusi pada Subbag Keuangan Juru Muda (I / d)	
60	RAHMADI NIP. 19801208 201001 1009	Juru Pungut Retribusi pada Subbag Keuangan Juru Muda (I / d)	
61	MUHAMMAD HATTA NIP. 19670307 201001 1 004	Juru Pungut Retribusi pada Subbag Keuangan Juru Muda (I / d)	
62	MISRAN NIP. 19720817 200701 1 030	Juru Pungut Retribusi pada Subbag Keuangan Juru (I/c)	
63	JURIADI NIP. 19810201 201212 1 003	Juru Pungut Retribusi pada Subbag Keuangan Juru (I/c)	

B. Data Kepangakatan

No	Gol/Ruang	Jumlah
1	IV/c	1 orang
2	IV/b	0 orang
3	IV/a	6 orang
4	III/d	3 orang
5	III/c	4 orang
6	III/b	3 orang
7	III/a	7 orang
8	II/d	10 orang
9	II/c	10 orang
10	II/b	4 orang
11	II/a	1 orang
12	I/d	1 orang
13	I/c	3 orang

14	I/b	0 orang
Jumlah		60 orang

C. Data Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S.3	0 orang
2	S.2	6 orang
3	S.1	15 orang
4	D.III	2 orang
5	D.II	-
6	SLTA	32 orang
7	SLTP	5 orang
Jumlah		60 orang

D. Data Diklat

No	Sudah Diklat Pim	Jumlah
1	II	1 orang
2	III	2 orang
3	IV	15 orang
Jumlah		18 orang

E. Uraian Tugas

1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menetapkan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaporkan, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
 - a. merencanakan dan menetapkan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - c. menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas Dinas;
 - d. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja program/ kegiatan pengelolaan kesekretariatan Dinas;
 - e. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang koperasi;
 - f. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang usaha mikro;

- g. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang perindustrian;
 - h. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang Kemetrolagian pengawasan perdagangan;
 - i. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja di bidang stabilitasi dan sarana distribusi perdagangan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait pelayanan di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
 - l. menyelenggarakan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Dinas;
 - m. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kinerja UPTD; dan
 - n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian.
- a. merencanakan dan merumuskan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
 - b. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sekretariat;
 - c. menyelia pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;

- e. menetapkan laporan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
- f. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- g. mendisposisikan kegiatan kepada sub bagian yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
- h. menyelenggarakan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;
- i. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;
- j. menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan perlengkapan;
- k. merumuskan dan memeriksa penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), KUA-PPAS, RKA, RKAP dan Laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- l. merumuskan, memeriksa dan menyelia pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
- m. merumuskan, memeriksa dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- n. merumuskan dan memeriksa penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- o. merumuskan dan memeriksa penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan

- penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;
- p. memfasilitasi penerimaan pegawai tidak tetap dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan dan penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil lingkup Dinas meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian lainnya;
 - q. memberikan usul dan saran kepada Kepala Dinas selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 - r. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - s. melaksanakan pengkoordinasian Bidang dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
 - t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di bidang koperasi yang meliputi kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi.
- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang koperasi yang meliputi kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi;
 - b. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi;
 - c. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi;

- d. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi;
- e. menetapkan laporan program kerja di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi;
- f. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. memeriksa data dan jumlah koperasi yang akurat;
- h. memeriksa data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- i. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- j. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- k. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- l. mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- m. mengkoordinasikan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- n. mengkoordinasikan Pengawasan Koperasi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- p. mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- q. mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- r. mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- s. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;

- t. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - u. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - v. mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
 - w. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - x. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
 - z. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - aa. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
 - bb. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - cc. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang usaha mikro yang meliputi pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro dan pengembangan kewirausahaan.
- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang pembinaan Usaha Mikro, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro serta pengembangan Kewirausahaan;
 - b. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan Usaha Mikro, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro serta pengembangan Kewirausahaan;
 - c. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang pembinaan Usaha Mikro, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro serta pengembangan Kewirausahaan;
 - d. menetapkan laporan program kerja di bidang pembinaan Usaha Mikro, pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro serta pengembangan Kewirausahaan;

- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha mikro meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
 - f. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro didalam dan luar negeri;
 - h. mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - i. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - j. mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
 - k. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - l. mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang dapat bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
 - m. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - n. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
 - p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - q. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
 - r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di bidang perindustrian yang meliputi pemberdayaan dan inovasi industri, pembangunan dan pengembangan industri dan sistem informasi dan fasilitasi industri.

- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang pemberdayaan dan inovasi industri, pembangunan dan pengembangan industri dan sistem informasi dan fasilitasi industri;
- b. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan inovasi industri, pembangunan dan pengembangan industri dan sistem informasi dan fasilitasi industri;
- c. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan dan pengembangan pembangunan industri, perizinan dan inovasi industri, dan sistem informasi industri;
- d. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang pemberdayaan dan inovasi industri, pembangunan dan pengembangan industri dan sistem informasi dan fasilitasi industri;
- e. menetapkan laporan program kerja di bidang pemberdayaan dan inovasi industri, pembangunan dan pengembangan industri dan sistem informasi dan fasilitasi industri;
- f. merekomendasikan Izin Usaha Industri (IUI) Mikro;
- g. merekomendasikan IPUI bagi industri mikro;
- h. merekomendasikan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan IPKI;
- i. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- j. mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
- k. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;

- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas–tugas di bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan yang meliputi pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan.
- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang pelayanan tera/tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
 - b. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan tera/tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
 - c. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang pelayanan tera/tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang pelayanan tera/tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
 - e. menetapkan laporan program kerja di bidang pelayanan tera/tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
 - f. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - h. mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
 - i. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;

- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - m. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
 - n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
8. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan yang meliputi pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting.
- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan dan program kerja di bidang pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting;
 - b. merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting;
 - c. menyelia pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting;
 - d. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting;
 - e. mensosialisasikan kebijakan dan program kerja di bidang pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting;
 - f. merumuskan perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

- h. mendisposisikan kegiatan kepada seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
- i. memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. melaksanakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

1. Proses yang dilakukan adalah menyusun Rancangan dengan menetapkan kriteria alternatif yang terbaik, baik yang telah ditentukan berdasarkan urusan pemerintahan, program dan kegiatan maupun melalui perencanaan partisipatif melalui musrenbang baik Desa, Kecamatan maupun Kabupaten, dan Usulan Rancangan awal RKPD dengan penyediaan anggaran terjadi *exceed financial account* artinya jumlah yang diusulkan lebih besar dari dana yang tersedia.
2. Proses ini dilakukan berpedoman pada UU nomor 25 tahun 2004, tentang SPPU dan Permendagri nomor 13 tahun 2006, jo; Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan keuangan daerah.
3. Temuan setelah proses tersebut adalah berubahnya nilai anggaran yang disediakan dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah karena proses dinamika anggaran yang terjadi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Usulan Program kegiatan dilakukan melalui :

a. Proses kriteria Tehnokratif

Yaitu menyesuaikan dengan program/kegiatan baku yang telah disediakan baik Pusat, Propinsi maupun Kabupaten, yang dilakukan oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan.

b. Proses Politik

Yaitu usulan yang dilakukan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

c. Proses Partisipatif

Yaitu usulan yang melibatkan stakeholders melalui musrenbang.

d. Proses Bottom up dan Topdown, yaitu memformulasikan usulan dari atas ke bawah dan dari bawah keatas yang tentunya disesuaikan dengan RPJMD.

2. Kesesuaian usulan dengan isu-isu prinsip penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, adalah :

a. Mendorong koordinasi antar pelaku pembangunan

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang , antar waktu, antar fungsi Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

e. Menjamin tercapainya penyusunan sumber daya secara efisien dan efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kebijakan dan program merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dari menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Industri.
2. Pengembangan Potensi SDA yang dapat di olah dan memiliki nilai tambah.
3. Pemerataan terhadap pembinaan yang sinergitas dan regulasi yang mampu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan.
4. Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksinya.

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Koperasi dan UKM

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil tersebut adalah :

- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

❖ Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

b. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

- ❖ Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

c. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

- ❖ Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

d. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

- ❖ Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

e. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

- ❖ Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- f. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 - ❖ Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- g. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
 - ❖ Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Urusan Pilihan Perindustrian

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Pilihan Perindustrian tersebut adalah :

- a. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - ❖ Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- b. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
 - ❖ Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUII), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- c. **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**
- ❖ **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

3. **Urusan Pilihan Perdagangan**

Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok Urusan Pilihan Perdagangan tersebut adalah :

- a. **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**
- ❖ **Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - ❖ **Penerbitan Tanda Daftar Gudang**
 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
 - ❖ **Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**

- Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri
 - ❖ Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
 - Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri
 - Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri
 - ❖ Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C
 - ❖ Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA- B2
 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)
 - ❖ Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
- b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
- ❖ Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - ❖ Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- c. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
- ❖ Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
 - ❖ Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
- ❖ Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
 - Pameran Dagang Nasional
 - Pameran Dagang Lokal
 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
 - Peningkatan Citra Produk Ekspor
 - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
- e. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

❖ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- Penyidikan Metrologi Legal

f. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

❖ Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Dalam rangka mendukung RKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 untuk meningkatkan pemenuhan pelayanan penunjang sektor perekonomian yang merupakan prioritas daerah dengan:

1. Sub prioritas peningkatan nilai tambah dan daya saing, program yang sangat menunjang yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2. Sub Prioritas peningkatan kemandirian desa, program yang sangat menunjang yaitu Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) pada :

1. Tujuan 9 yaitu Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi. Hal tersebut dapat didukung dengan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Target penerimaan retribusi jasa umum dan jasa usaha lingkup pasar kemakmuran Kabupaten Kotabaru untuk tahun anggaran 2023

Pengelolaan retribusi daerah jasa umum dan jasa usaha pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kotabaru berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Bahwa dalam menyusun perencanaan terkait usulan target penerimaan dan pengelolaan retribusi daerah meliputi retribusi daerah pengelolaan pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kotabaru terdapat dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun untuk prakiraan target penerimaan retribusi daerah untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.427.728.985.- dan adanya perubahan kenaikan retribusi jasa umum yaitu retribusi Pelayanan Pasar-kios meliputi retribusi perpanjangan /balik nama pedagang dan kartu pedagang sebesar Rp. 10.000.000 menjadi target penerimaan retribusi jasa umum sebesar Rp 2.437.728.985.- Daftar rincian penerimaan retribusi daerah Jasa Umum dan jasa usaha dapat dilihat pada table lampiran :

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kotabaru diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penetapan Rencana Kerja Dinas koperasi Perindustrian dan perdagangan Kabupaten kotabaru ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum serta (KUA) prioritas Anggaran APBD. Dalam kaitan ini maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Penetapan Rencana Kerja Dinas koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru dan Kepala Perangkat Daerah mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur.

Penyusunan Penetapan Rencana Kerja (RENJA) didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis

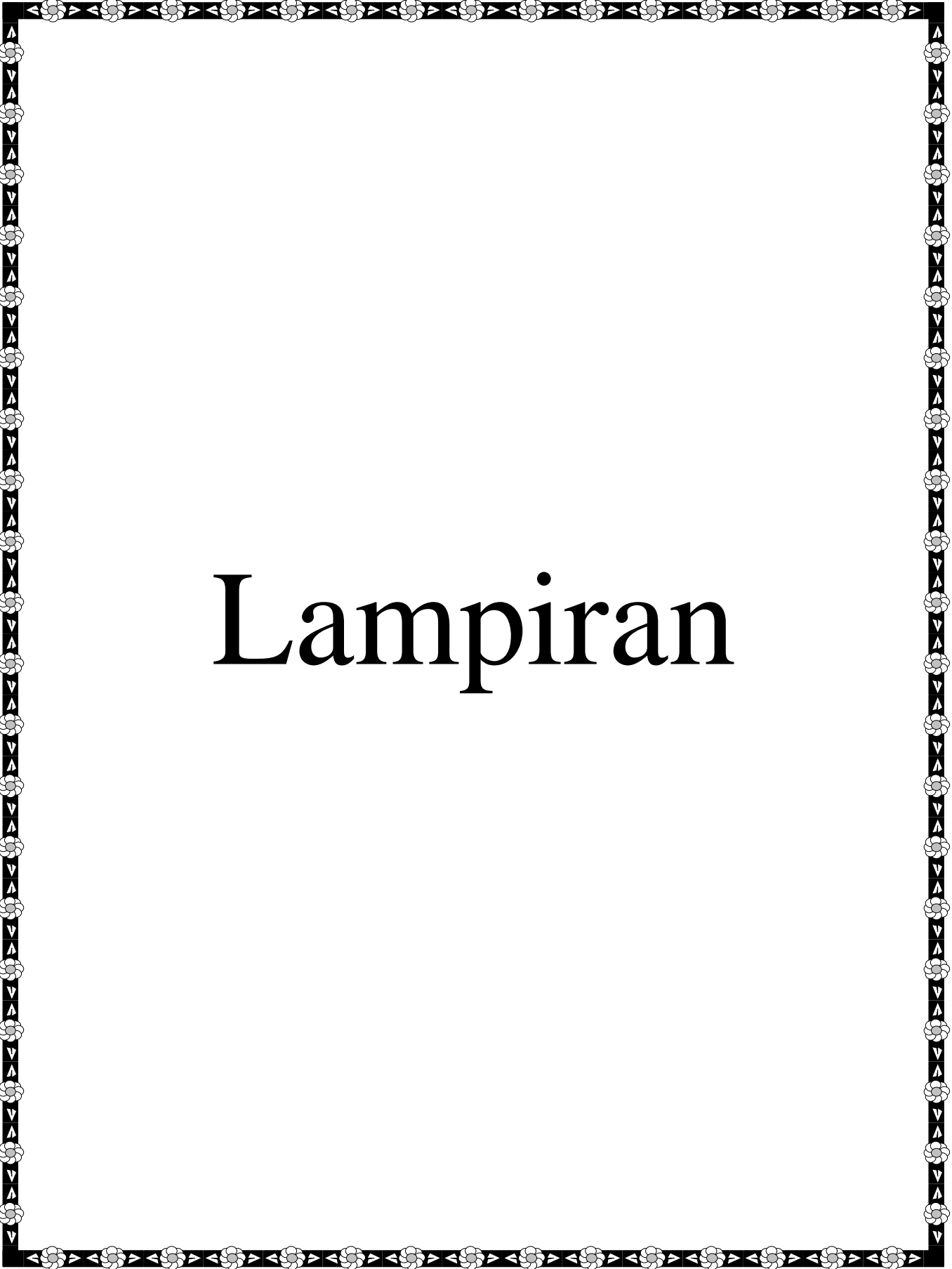
Demikian rancangan Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ini disusun sebagai pedoman dan dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang sudah ditetapkan.

Kotabaru, Agustus 2023

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru



Ir. H. HARDHANI, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650401 199308 1 001



Lampiran

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
Kabupaten Kotabaru

Kode Program dan Kegiatan					Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)							
1					2	3	4	5	6	7	12		13 = 6 + 12	14= 13/5 x 100%							
						NON URUSAN		K	K	K	K	K	Rp.	K	K	Rp					
X	XX	01			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP)		100%	100%		#VALUE!	90.96		#VALUE!	18.19					
X	XX	01	2.01		Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*)	100%	100%	100%		#VALUE!	99.10		#VALUE!	19.82					
X	XX	01	2.01	01	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)	15	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00	98.91	18	Dokumen	20.00	19.78		
X	XX	01	2.01	02	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun *)	4	Dokumen			-	-	-	4	Dokumen	-	-			
X	XX	01	2.01	03	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun*)	4	Dokumen			-	-	-	4	Dokumen	-	-			
X	XX	01	2.01	04	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun*)	4	Dokumen			-	-	-	4	Dokumen	-	-			
X	XX	01	2.01	05	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun*)	4	Dokumen			-	-	-	4	Dokumen	-	-			
X	XX	01	2.01	06	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun*)	48	Dokumen			-	-	-	48	Dokumen	-	-			
X	XX	01	2.01	07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*)	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	#VALUE!	Dokumen	#VALUE!	99.62	#VALUE!	Dokumen	#VALUE!	19.92
X	XX	01	2.02		Terlaksananya penyusunan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*)	-	100%	100%	100%		99.70	91.32		19.94	18.26				
X	XX	01	2.02	01	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan*)	130	Kali	26	Kali	26	Kali	100.00	92.82	156	Kali	20.00	18.56		
X	XX	01	2.02	02	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terbayarkan*)	83	kali	35	Orang	35	kali	97.14	78.53	117	kali	19.43	15.71		
X	XX	01	2.02	03	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*)	48	kali			-	-	-	48		-	-			
X	XX	01	2.02	04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD tersusun*)	4	Dokumen			-	-	-	4		-	-			
X	XX	01	2.02	05	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*)	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00	100.00	6	Dokumen	20.00	20.00		
X	XX	01	2.02	06	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyipen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyipen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan tersusun*)	4	Dokumen			-	-	-	4	Dokumen	-	-			
X	XX	01	2.02	07	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun*)	4	Dokumen			-	-	-	4	Dokumen	-	-			
X	XX	01	2.02	08	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun*)	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00	100.00	6	Dokumen	20.00	20.00		
X	XX	01	2.05		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*)	1	100%	100%	100%		#VALUE!	95.47		#VALUE!	19.09				
X	XX	01	2.05	01	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan*)	-				-	-	-	-		-	-			
X	XX	01	2.05	02	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan*)	15	Kali	3	Kali	3	Kali	#VALUE!	Kali	#VALUE!	95.47	#VALUE!	Kali	#VALUE!	19.09
X	XX	01	2.05	03	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen data Administrasi Kepegawaian tersusun*)	-				-	-	-	-		-	-			
X	XX	01	2.05	04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Inhmasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian berfungsi dengan baik*)	-				-	-	-	-		-	-			

Kode Program dan Kegiatan					Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		
1					2	3	4	5	6	7	12		13 = 6 + 12	14= 13/5 x 100%		
								K	K	K	K	K	Rp.	K	K	Rp.
X	XX	01	2.05	05	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai tersusun")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.05	06	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai Pensiun terfasilitas")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.05	07	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang terfasilitas")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.05	08	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN yang terfasilitas")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.05	09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang diselenggarakan")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.05	10	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.05	11	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang Diselenggarakan")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.06		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah")	100 %	100%	100%		100.00	98.87		20.00	19.77
X	XX	01	2.06	01	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan")	60 kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100.00	100.00	72 Kali	20.00	20.00
X	XX	01	2.06	02	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan")	60 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100.00	91.93	72 Kali	20.00	18.39
X	XX	01	2.06	03	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan")	48 kali			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.06	04	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan")	60 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100.00	98.85	72 Kali	20.00	19.77
X	XX	01	2.06	05	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan")	60 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100.00	99.85	72 Kali	20.00	19.97
X	XX	01	2.06	06	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan")	60 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100.00	94.40	72 Kali	20.00	18.88
X	XX	01	2.06	07	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material yang disediakan")	12 kali			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.06	08	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang disedakan")	70 Kali	14 Kali	14 Kali	14 Kali	100.00	99.70	84 Kali	20.00	19.94
X	XX	01	2.06	09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan")	75 Kali	75 Kali	75 Kali	75 Kali	100.00	99.52	450 Kali	20.00	19.90
X	XX	01	2.06	10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang terkolekt")	4 kali			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.06	11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang diadakan")	4 kai			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.07		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu")	-	100%	100%	100%	100.00	97.88		20.00	19.58
X	XX	01	2.07	01	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.07	02	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.07	03	Terlaksananya Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar yang diadakan")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.07	04	Terlaksananya Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.07	05	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan")	-			-	-	-	-	-	-
X	XX	01	2.07	06	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan")	14 Buah	6 Buah	6 Buah	6 Buah	100.00	97.88	20 Buah	20.00	19.58
X	XX	01	2.07	07	Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya yang diadakan")	-			-	-	-	-	-	-

Kode Program dan Kegiatan						Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)					
1						2	3	4	5	6		7	12			13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%			
									K	K		K	K	Rp.	K		K	Rp.			
X	XX	01	2.07	08	Terlaksananya Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud yang diadakan*)	-				-		-	-	-	-	-			
X	XX	01	2.07	09	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun*)	-				-		-	-	-	-	-			
X	XX	01	2.07	10	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*)	-				-		-	-	-	-	-			
X	XX	01	2.07	11	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*)	-				-		-	-	-	-	-			
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*)	-	100%		100%	100%		92.51	71.82		18.50	14.36			
X	XX	01	2.08	01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia*)	7.500	Lembar	1500	Lembar	1500	Lembar	1.500	Lembar	100.00	100.00	9.000	Lembar	20.00	20.00
X	XX	01	2.08	02	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*)	60	Langganan	4	Langganan	12	Langganan	11	Langganan	91.67	68.79	31	Langganan	18.33	13.76
X	XX	01	2.08	03	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*)	8	kali			-		-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.08	04	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan*)	264	Kali	24	Kali	24	Kali	24	Kali	100.00	98.36	288	Kali	20.00	19.67
X	XX	01	2.09		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *)	-	100%		100%	100%		87.13	71.05		17.43	14.21			
X	XX	01	2.09	01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan*)	48	Unit			-		-	-	48	Unit	-	-	-	
X	XX	01	2.09	02	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan*)	33	Unit	17	Unit	17	Unit	16	Unit	94.12	80.96	49	Unit	18.82	16.19
X	XX	01	2.09	03	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Pemeliharaan Alat Besar yang disediakan*)	-				-		-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.09	04	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang disediakan*)	-				-		-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.09	05	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel yang disediakan*)	-				-		-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.09	06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan*)	185	Kali	35	Kali	35	Kali	35	Kali	100.00	100.00	215	Kali	20.00	20.00
X	XX	01	2.09	07	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya yang disediakan*)	-				-		-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.09	08	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud terpelihara*)	-				-		-	-	-	-	-	-	-	
X	XX	01	2.09	09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan*)	8	Unit			-		-	-	8	Unit	-	-	-	
X	XX	01	2.09	10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*)	4	Unit			-		-	-	4	Unit	-	-	-	
X	XX	01	2.09	11	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan*)	32	Unit	10	Unit	10	Unit	7	Unit	70.00	42.18	48	Unit	14.00	8.44
X	XX	01	2.09	12	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi tanah yang disediakan*)	-				-		-	-	-	-	-	-	-	

Kode Program dan Kegiatan					Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)			
1					2	3	4	5	6	7	12			13 = 6 + 12	14= 13/5 x 100%		
								K	K	K	K	K	Rp.	K	K	Rp.	
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						#VALUE!	94.47			#VALUE!	18.89
2	17	02			Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Fasilitas Koperasi yang memiliki Perizinan Usaha	100.00%	0.00%			-	-			-	-
2	17	02	2.01		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	0.00%			-	-			-	-
2	17	02	2.01	01	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 kali			-	-	-	20 kali		-	-
2	17	02	2.02		Meningkatnya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	100.00%	0.00%			-	-			-	-
2	17	02	2.02	01	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 kali			-	-	-	12 kali		-	-
2	17	03			Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	48.00%	28.57%		28.57%	#VALUE!	81.00			#VALUE!	16.20
2	17	03	2.01		Meningkatnya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	48.00%	28.57%		28.57%	#VALUE!	81.00			#VALUE!	16.20
2	17	03	2.01	01	Meningkatnya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 kali	3 Kali		3 Kali	#VALUE!	Kali	#VALUE!	95.03	#VALUE!	19.01
2	17	03	2.01	02	Meningkatnya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 kali	6 Kali		6 Kali	#VALUE!	Kali	#VALUE!	59.86	#VALUE!	11.97
2	17	04			Meningkatnya Kualitas KSPI/USP Koperasi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPI/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi	100.00%	20.00%		20.00%	100.00	98.37			20.00	19.67
2	17	04	2.01		Meningkatnya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	20.00%		20.00%	100.00	98.37			20.00	19.67
2	17	04	2.01	01	Meningkatnya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen	100.00	98.37	60	Dokumen	20.00	19.67
2	17	04	2.01	02	Meningkatnya Penghargaan Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penghargaan Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Dokumen			-	-	-	40	Dokumen	-	-
2	17	05			Meningkatnya koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	47.62%	47.62%		47.62%	#VALUE!	96.52			#VALUE!	19.30

Kode Program dan Kegiatan					Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		
1					2	3	4	5	6	7	12			13 = 6 + 12	14= 13/5 x 100%		
								K	K	K	K	K	Rp.	K	K	Rp.	
2	17	05	2.01		Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	47.62%	47.62%	47.62%		#VALUE!	98.45		#VALUE!	19.69	
2	17	05	2.01	01	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	10 kali	2 Kali	2 Kali	#VALUE!	Kali	98.45	#VALUE!	#VALUE!	19.69	
2	17	05	2.01		Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan Dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah KABUPATEN/KOTA	Persentase Pendidikan Dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah KABUPATEN/KOTA	100.00%		20.00%			100.00	93.69		20.00	18.74
2	17	05	2.01	02	Meningkatnya peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	10 Kali		2 Kali	2 kali	100.00	93.69	10 kali		20.00	18.74
2	17	06			Meningkatnya koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	57.14%	57.14%	57.14%		#VALUE!	99.92		#VALUE!	19.98	
2	17	06	2.01		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah	57.14%	57.14%	57.14%		#VALUE!	99.92		#VALUE!	19.98	
2	17	06	2.01	01	Meningkatnya Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 kali	2 Kali	2 Kali	#VALUE!	Kali	99.92	#VALUE!	Kali	#VALUE!	19.98
2	17	07			Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	100.00%	20.00%	20.00%			96.93	95.10		19.39	19.02
2	17	07	2.01		Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100.00%	20.00%	20.00%			96.93	95.10		19.39	19.02
2	17	07	2.01	01	Meningkatnya Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	767 kelompok	127 Kelompok/ UMK	127 Kelompok/ UMK	108 Kelompok /UMK	96.85	95.04	875 Kelompok/ UMK		19.37	19.01
2	17	07	2.01	02	Meningkatnya Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	40 UMK			-			40	-	-	
2	17	07	2.01	03	Meningkatnya Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	270 UMK	30 UMK	30 UMK	30 UMK	100.00	100.00	300 UMK	20.00	20.00	
2	17	07	2.01	04	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	270 UMK	30 UMK	30 UMK	29 UMK	96.67	92.04	299 UMK	19.33	18.41	
2	17	07	2.01	05	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	120 UMK			-	-	-	120	-	-	
2	17	08			Meningkatnya Usaha Mikro yang mendapatkan pembinaan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	100.00%	20.00%	20.00%		100.00	95.32			20.00	19.06
2	17	08	2.01		Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	100.00%	20.00%	20.00%		100.00	95.32			20.00	19.06
2	17	08	2.01	01	Meningkatnya Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	525 kali	15 Kali	15 Kali	15 kali	100.00	95.32	540 kali	20.00	19.06	
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						100.00	97.83			20.00	19.57

Kode Program dan Kegiatan					Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)	
1					2	3	4	5		6		7		12				13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%	
								K		K		K		K		K	Rp.	K		K	Rp.
3	30	02			Meningkatnya perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				77.78%		77.78%			#VALUE!	92.64			#VALUE!	18.53
3	30	02	2.01		Meningkatnya pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Rekomendasi pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan									-	-	-		-	-
3	30	02	2.01	01	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	32	kali					-	-	-	-	32		-	-
3	30	02	2.02		Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang									-	-			-	-
3	30	02	2.02	01	Meningkatnya Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	32	kali					-	-	-	-	32		-	-
3	30	02	2.03		Meningkatnya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri									-	-			-	-
3	30	02	2.03	01	Meningkatnya Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	32	kali					-	-	-	-	32		-	-
3	30	02	2.03	02	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	20	kali					-	-	-	-	20		-	-
3	30	02	2.04		Meningkatnya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri									-	-			-	-
3	30	02	2.04	01	Meningkatnya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)	32	kali					-	-	-	-	32		-	-
3	30	02	2.04	02	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah rekomendasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	32	kali					-	-	-	-	32		-	-
3	30	02	2.05		Meningkatnya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat									-	-			-	-
3	30	02	2.05	01	Meningkatnya Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	32	kali					-	-	-	-	32		-	-
3	30	02	2.06		Meningkatnya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									-	-			-	-
3	30	02	2.06	01	Meningkatnya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	32	kali					-	-	-	-	32		-	-
3	30	02	2.06	02	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	32	kali					-	-	-	-	32		-	-
3	30	02	2.06	03	Meningkatnya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	32	kali					-	-	-	-	32		-	-

Kode Program dan Kegiatan					Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)					
1					2	3	4	5		6	7	12			13 = 6 + 12	14= 13/5 x 100%					
								K		K	K	K	K	Rp.	K	K	Rp.				
3	30	02	2.07		Meningkatnya Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			77.78%		77.78%			#VALUE!	92.64	#VALUE!	18.53			
3	30	02	2.07	01	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	40	kali	8	Kali	8	Kali	#VALUE!	kali	#VALUE!	92.64	#VALUE!	18.53		
3	30	03			Meningkatnya pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan			38.46%		38.46%			100.00	99.02		20.00	19.80		
3	30	03	2.01		Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			16.92%		16.92%			100.00	99.00		20.00	19.80		
3	30	03	2.01	01	Meningkatnya Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	26	paket	10	Paket	12	Paket	12	Paket	100.00	98.99	38	Paket	20.00	19.80
3	30	03	2.01	02	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitas Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	240	kali	48	Kali	48	Kali	48	Kali	100.00	99.70	288	Kali	20.00	19.94
3	30	03	2.02		Meningkatnya Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			23.08%		23.08%			100.00	99.79		20.00	19.96		
3	30	03	2.02	01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	250	kali	50	Kali	50	Kali	50	Kali	100.00	99.79	300	Kali	20.00	19.96
3	30	03	2.02	02	Meningkatnya Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	120	kali					-		-	-	120		-	-
3	30	04			Meningkatnya stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok			100.00%		100.00%			100.00	87.21		20.00	17.44		
3	30	04	2.01		Meningkatnya Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							-		-		-	-		
3	30	04	2.01	01	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48	kali					-		-	-	48		-	-
3	30	04	2.01	02	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48	kali					-		-	-	48		-	-
3	30	04	2.01	03	Meningkatnya Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	96	kali					-		-	-	96		-	-
3	30	04	2.02		Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			100.00%					100.00	87.21		20.00	17.44		
3	30	04	2.02	01	Meningkatnya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	384	kali					-		-	-	384		-	-
3	30	04	2.02	02	Meningkatnya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	480	kali	96	Kali	96	Kali	96	Kali	100.00	87.21	576		20.00	17.44
3	30	04	2.02	03	Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	16	kali					-		-	-	16		-	-
3	30	04	2.03		Meningkatnya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-		-		-	-		

Kode Program dan Kegiatan					Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)			
1					2	3	4	5	6	7	12		13 = 6 + 12	14= 13/5 x 100%			
								K	K	K	K	K	Rp.	K	K	Rp.	
3	30	04	2.03	01	Meningkatnya Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	24 kali			-	-	-	24	-	-	
3	30	04	2.03	02	Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24 kali			-	-	-	24	-	-	
3	30	04	2.03	03	Meningkatnya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24 kali			-	-	-	24	-	-	
3	30	05			Meningkatnya Pengembangan Ekspor Unggulan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan					-	-		-	-	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					-	-		-	-	
3	30	05	2.01	01	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	192 kali			-	-	-	192	-	-	
3	30	05	2.01	02	Meningkatnya Pameran Dagang Nasional	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional	8 kali			-	-	-	8	-	-	
3	30	05	2.01	03	Meningkatnya Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	8 kali			-	-	-	8	-	-	
3	30	05	2.01	04	Meningkatnya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	160 kali			-	-	-	160	-	-	
3	30	05	2.01	05	Meningkatnya Peningkatan Citra Produk Ekspor	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Peningkatan Citra Produk Ekspor	160 kali			-	-	-	160	-	-	
3	30	05	2.01	06	Meningkatnya Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	160 kali			-	-	-	160	-	-	
3	30	06			Meningkatnya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar	100%	20%	20%		#VALUE!	88.09		#VALUE!	17.62	
3	30	06	2.01		Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	20%	20%		#VALUE!	88.09		#VALUE!	17.62	
3	30	06	2.01	01	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	5 paket	1 Paket	1 Paket	#VALUE!	Paket	#VALUE!	86.64	#VALUE!	Paket	17.33
3	30	06	2.01	02	Meningkatnya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	60 kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	100.00	100.00	72 Kali	20.00	20.00	
3	30	06	2.01	03	Meningkatnya Penyidikan Metrologi Legal	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Penyidikan Metrologi Legal	5000 Buah	1000 Buah	1000 Buah	987 Buah	98.70	77.80	5.987 Buah	19.74	15.56	
3	30	07			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri					-	-		-	-	
3	30	07	2.01		Meningkatnya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri					-	-		-	-	
3	30	07	2.01	01	Meningkatnya Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					-	-	-	-	-	
3	30	07	2.01	02	Meningkatnya Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					-	-	-	-	-	
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan					-	-	-	-	-	
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						#VALUE!	95.48		#VALUE!	19.10	
3	31	02			Meningkatnya Pertumbuhan IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	100%	20%	20%		#VALUE!	95.75		#VALUE!	19.15	
3	31	02	2.01		Meningkatnya hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda	100%	20%	20%		#VALUE!	95.75		#VALUE!	19.15	
3	31	02	2.01	01	Meningkatnya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	9 kali	1 Kali	1 Kali	#VALUE!	Kali	#VALUE!	63.72	#VALUE!	Kali	12.74
3	31	02	2.01	02	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	4 kali			-	-	-	4 kali	-	-	

Kode Program dan Kegiatan					Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 (Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (%)		
1					2	3	4	5	6	7	12				13 = 6 + 12		14= 13/5 x 100%	
								K	K	K	K	K	Rp.	K	K	Rp.	K	Rp.
3	31	02	2.01	03	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 #KM	2 #KM/ Kelompok	2 #KM/ Kelompok	#VALUE!	#KM/ Kelompok	#VALUE!	85.84	#VALUE!	#KM/ Kelompok	#VALUE!	17.17
3	31	02	2.01	04	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	110 #KM	22 Kelompok/#KM	22 Kelompok/#KM	22 Kelompok/#KM	100.00	99.73	132 Kelompok/#KM	20.00	19.95		
3	31	02	2.01	05	Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	30 kali	6 Kali	6 kali	6 kali	100.00	90.64	6 kali	20.00	18.13		
3	31	02	2.01	06	Meningkatnya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 kali			-	-	-	4 kali	-	-		
3	31	03			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait					-	-		-	-		
3	31	03	2.01		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)					-	-		-	-		
3	31	03	2.01	01	Meningkatnya Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	8 kali			-	-	-	8 kali	-	-		
3	31	03	2.01	02	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	8 kali			-	-	-	8 kali	-	-		
3	31	04			Meningkatnya Penyediaan Sistem Informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Sistem Informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	100%	68%	68%		#VALUE!	88.41		#VALUE!	17.68		
3	31	04	2.01		Meningkatnya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas	100%	68%	68%		#VALUE!	88.41		#VALUE!	17.68		
3	31	04	2.01	01	Meningkatnya Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah dokumen Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	8 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	#VALUE!	Dokumen	#VALUE!	88.41	#VALUE!	Dokumen	#VALUE!	17.68
3	31	04	2.01	02	Meningkatnya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah dokumen Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	8 Dokumen			-	-	-	8 Dokumen	-	-		
3	31	04	2.01	03	Meningkatnya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINAS	8 Dokumen			-	-	-	8 Dokumen	-	-		
												#VALUE!	93.39		#VALUE!	108.12		

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kotabaru

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian	Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-5)	Tahun 2022 (thn n-4)	Tahun 2023 (thn n-3)	Tahun 2024 (thn n-4)	Tahun 2025 (thn n-5)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2021 (thn n-5)	
1	Persentasi Koperasi Aktif	-	-	66.39%	66.67%	66.94%	67.21%	67.48%	67.74%	53.65%	
2	Persentasi Usaha mikro menjadi usaha kecil	-	-	22.22%	24.44%	26.67%	28.89%	31.11%	33.33%	22.22%	
3	Persentasi industri kecil dengan produk yang memenuhi standar mutu	-	-	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	50.00%	
4	Persentase Fasilitas Koperasi yang memiliki Perizinan Usaha	-	-	0.00%	26.67%	46.67%	66.67%	86.67%	100%	0.00%	
5	Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT	-	-	28.57%	36.36%	39.13%	41.67%	44.00%	48.00%	36.19%	
6	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	-	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	92.00%	100.00%	20.00%	
7	Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-	-	47.62%	47.62%	47.62%	47.62%	47.62%	47.62%	47.62%	
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	-	-	57.14%	57.14%	57.14%	57.14%	57.14%	57.14%	57.14%	
9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	-	-	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	90.00%	100%	20.00%	
10	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	-	-	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	90.00%	100%	20.00%	
11	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	-	77.78%	83.33%	88.89%	94.44%	96.67%	100%	77.78%	
12	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	38.46%	46.15%	53.85%	61.54%	69.23%	76.92%	38.46%	
13	Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan	-	-	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	
15	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar	-	-	20%	40.00%	60%	80%	90%	100%	20%	
16	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	-	-	0	100%	100%	100%	100%	100%	0	
17	Persentase Pertumbuhan IKM	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	
18	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-	-	0	4.39%	4.39%	4.39%	4.39%	4.39%	0	
19	Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	-	-	68%	76.00%	84.00%	92.00%	96%	100%	68%	

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2023

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal Perangkat Daerah					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	NON URUSAN				11,432,199,000	NON URUSAN				11,195,121,870
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	11,432,199,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	11,195,121,870
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,025,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	313,500,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	475,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	213,500,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	75,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	75,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	75,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	75,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	125,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	125,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	100,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7,410,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kualitas pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8,974,927,500
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	6,500,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	6,878,875,300
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	650,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1,518,177,200
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	220,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	573,375,000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	12,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,500,000
	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7,000,000	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	7,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	-
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			100%	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			100%	-
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1	Laporan
	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		Dokumen	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		Dokumen
	(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendaftaran dan pendaftaran)	Kab. Kotabaru				(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendaftaran dan pendaftaran)				
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		Laporan	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		Laporan
	(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendaftaran dan pendaftaran)	Kab. Kotabaru				(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendaftaran dan pendaftaran)				
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		Dokumen	Penetapan Wajib Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		Dokumen
	(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendaftaran dan pendaftaran)	Kab. Kotabaru				(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendaftaran dan pendaftaran)				
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Dokumen	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	260.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket
	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Kotabaru	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		Orang	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Kotabaru	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		Orang
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Laporan	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Laporan
	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah ASN yang pindahtugaskan		Orang	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Kotabaru	Jumlah ASN yang pindahtugaskan		Orang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotabaru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kotabaru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Mengikut Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Mengikut Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Mengikut Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Orang yang Mengikut Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat	100%	1.385.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat	100%	927.676.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	14	Laporan	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	14	Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan
	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	54.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	33.890.570
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Unit
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pengadaan Alat Besar	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		Pengadaan Alat Besar	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	
	Pengadaan Mebel	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	27.000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Kotabaru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	27.000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	33.890.570
	Pengadaan Aseel Tetap Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Aseel Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Aseel Tetap Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Aseel Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
	Pengadaan Aseel Tak Berwujud	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Aseel Tak Berwujud yang Disediakan	Unit		Pengadaan Aseel Tak Berwujud	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Aseel Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kualitas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	702.600,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kualitas Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	620.600,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16.000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	550.000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	461.000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	136.600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	144.600,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	675.000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kualitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	234.527,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	120.000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kotabaru	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	80.000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	153.977,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Kotabaru	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Kotabaru	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Kotabaru	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Kotabaru	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kotabaru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		Pemeliharaan Mebel	Kab. Kotabaru	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	75.000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	80.550,000
	Pemeliharaan Aseel Tetap Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Aseel Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		Pemeliharaan Aseel Tetap Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Aseel Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	
	Pemeliharaan Aseel Tak Berwujud	Kab. Kotabaru	Jumlah Aseel Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		Pemeliharaan Aseel Tak Berwujud	Kab. Kotabaru	Jumlah Aseel Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	275.000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	50.000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Kotabaru	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kab. Kotabaru	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				2.803.000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.250.060,000
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase pertumbuhan Koperasi	46.67%	50.000,000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase pertumbuhan Koperasi	46.67%	-
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.00%	25.000,000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.00%	-
	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit Usaha	25.000,000	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit Usaha	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	50.00%	25.000.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	50.00%	-
	Facilitasi Pemenuhan Isi Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	25.000.000	Facilitasi Pemenuhan Isi Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Isi Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit Usaha
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	39.13%	290.000.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	39.13%	290.000.000
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	39.13%	290.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	39.13%	290.000.000
	Pengawasan Kelakuan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kelakuan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35	130.000.000	Pengawasan Kelakuan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengawasan Kelakuan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Unit Usaha
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	4	160.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Unit Usaha
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPUSP KOPERASI		Persentase Koperasi yang berprestasi	60.00%	80.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPUSP KOPERASI		Persentase Koperasi yang berprestasi	60.00%	-
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.00%	80.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.00%	-
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Kabupaten/Kota	10	40.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Unit Usaha
	Penghargaan Kesehatan KSPUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Kabupaten/Kota	10	40.000.000	Penghargaan Kesehatan KSPUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Penghargaan Kesehatan KSPUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Unit Usaha
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	47.62%	320.000.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	47.62%	100.000.000
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	47.62%	320.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	47.62%	100.000.000
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kotabaru	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60	320.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Kotabaru	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	60	Orang
	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM				
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro					Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	57.14%	120.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	57.14%	90.000.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah	57.14%	120.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah	57.14%	90.000.000
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15	120.000.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Unit Usaha
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Keluarga
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	60.00%	1.170.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	60.00%	360.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	60.00%	1,170,000,000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	60.00%	360,000,000
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	160 Orang	600,000,000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	160 Orang	200,000,000
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	120,000,000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	
	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	150,000,000	Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	160,000,000
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60 Unit Usaha	150,000,000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30 Orang	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30 Orang	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	60.00%	773,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	60.00%	410,060,000
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	60.00%	773,000,000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	60.00%	410,060,000
	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	128 Unit Usaha	773,000,000	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	128 Unit Usaha	410,060,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				20,045,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2,389,100,000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	88.99%	1,285,000,000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	88.99%	200,000,000
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase Rekomendasi pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	100%	155,000,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Persentase Rekomendasi pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	100%	-
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kotabaru	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	155,000,000	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	85.00%	100,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	85.00%	100,000,000
	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8 Dokumen	100,000,000	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	8 Dokumen	100,000,000
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	100%	220,000,000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	100%	-
	Facilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	110,000,000	Facilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	8 Dokumen	
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	5 Dokumen	110,000,000	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	5 Dokumen	
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	100%	270,000,000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		Persentase Rekomendasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	100%	-
	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	8 Dokumen	160,000,000	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	8 Dokumen	-
	Facilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	8 Dokumen	110,000,000	Facilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	8 Dokumen	-
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	40.00%	110,000,000	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	40.00%	-
	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Kotabaru	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	110,000,000	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	10 Dokumen	-

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	40.00%	330,000,000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	40.00%	-		
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8	Laporan	110,000,000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	8	Laporan	-
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	8	Dokumen	110,000,000	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	8	Dokumen	
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	8	Laporan	110,000,000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	8	Laporan	
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	88.89%	100,000,000	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	88.89%	100,000,000		
	Koordinas dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8	Dokumen	100,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	8	Dokumen	100,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	53.85%	16,780,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	53.85%	1,714,100,000		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	27.89%	16,600,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	27.89%	1,634,100,000		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	16,500,000,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	1,424,100,000
			-Rehab drainase lingkungan pasar kemakmuran (1.500.000.000)					-Rehab drainase lingkungan pasar kemakmuran (1.500.000.000)				
			-Rehab berat bangunan/Gedung limbur raya (3.500.000.000)					-Rehab berat bangunan/Gedung limbur raya (3.500.000.000)				
			-Rehab berat bangunan pasar subuh pasar kemakmuran (3.500.000.000)					-Rehab berat bangunan pasar subuh pasar kemakmuran (3.500.000.000)				
			- Rehab berat bangunan pasar blok B/ F pasar Kemakmuran (Lanjutan) (6.000.000.000)					- Rehab berat bangunan pasar blok B/ F pasar Kemakmuran (Lanjutan) (6.000.000.000)				
			-Rehab atap pasar ikan isayur itaging (2.000.000.000)					-Rehab atap pasar ikan isayur itaging (2.000.000.000)				
	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	48	Unit	100,000,000	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	48	Unit	210,000,000
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	32.31%	180,000,000	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	32.31%	80,000,000		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50	Dokumen	70,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50	Dokumen	80,000,000
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30	Dokumen	110,000,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30	Dokumen	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100%	730,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100%	100,000,000		
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	280,000,000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	-		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	110,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	60,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24	Laporan	110,000,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24	Laporan	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota		Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	100%	270,000,000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota		Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	100%	100,000,000		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	96	Laporan	110,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	96	Laporan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	60.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	100.000.000
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36,36%	180.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36,36%	-
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	6 Dokumen	60.000.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	6 Dokumen	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6 Laporan	60.000.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6 Laporan	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kotabaru	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	6 Laporan	60.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6 Laporan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan	100%	660.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pengembangan Ekspor Unggulan	100%	-
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	660.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	-
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	48 Pelaku Usaha	160.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	48 Pelaku Usaha	
	Pameran Dagang Nasional	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	210.000.000	Pameran Dagang Nasional	Kab. Kotabaru	Jumlah Pameran Dagang Nasional	2 Pelaku Usaha	
	Pameran Dagang Lokal	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	110.000.000	Pameran Dagang Lokal	Kab. Kotabaru	Jumlah Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	40 Pelaku Usaha	60.000.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Kotabaru	Jumlah Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	40 Pelaku Usaha	
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kotabaru	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	40 Produk	60.000.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kotabaru	Jumlah Peningkatan Citra Produk Ekspor	40 Produk	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	40 Pelaku Usaha	60.000.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Kotabaru	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	40 Pelaku Usaha	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar	60%	440.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar	60%	325.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	60%	440.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	60%	325.000.000
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Kab. Kotabaru	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Penengkapan Ditera Ulang	650 Unit	150.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	650 Unit	150.000.000
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30 orang	120.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Kotabaru	Jumlah Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	30 orang	85.000.000
	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kotabaru	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	300 Unit	170.000.000	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Kotabaru	Jumlah Penyidikan Metrologi Legal	300 Unit	90.000.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	100%	150.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	100%	50.000.000
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	150.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	50.000.000
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kali	50.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kali	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kali	50.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kali	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2 Kali	50.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Kotabaru	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2 Kali	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.220.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				860.000.000,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Pertumbuhan IKM	60%	1.920.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Pertumbuhan IKM	60%	745.000.000,00
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase hasil penerapan RPK yang ditetapkan menjadi perda	60%	1.920.000.000,00	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase hasil penerapan RPK yang ditetapkan menjadi perda	60%	745.000.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	125,000,000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyaligahan Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan, Pengembangan, Penyebaran dan Penyaligahan Industri	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyaligahan Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penyaligahan Industri	1 Dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	350,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	150,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	950,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	295,000,000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	400,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	300,000,000
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	75,000,000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Kotabaru	Jumlah Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	4.39%	60,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	4.39%	15,000,000
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	4.39%	60,000,000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	4.39%	15,000,000
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Penyeratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	25,000,000	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Kotabaru	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Dokumen	15,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Penyediaan Sistem Informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	84.00%	240,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Penyediaan Sistem Informasi Data Industri secara lengkap dan terkini	84.00%	100,000,000
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas	84.00%	240,000,000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas	84.00%	100,000,000
	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	200,000,000	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Kotabaru	Jumlah Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	100,000,000
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	20,000,000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Kotabaru	Jumlah Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	2 Dokumen	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Kotabaru	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	20,000,000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Kotabaru	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	
					36,500,100,000					15,604,281,970

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Kecamatan		Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
1	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Cantung Kanan, Kab. Kotabaru	Hampang	Cantung Kanan				
2	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Hulu Sampanahan, Kab. Kotabaru	Hampang	Hulu Sampanahan				
3	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma PKK RT.001/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
4	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma PKK RT.001/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
5	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemeras Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma PKK RT.002/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
6	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Tapak Dara Naga RT.003/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
7	Bantuan Peralatan Pengolahan Aneka Kacang dan Kue Kering	Dasawisma Mawar Jeruk PKK RT.004/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
8	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Mawar Jeruk PKK RT.004/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
9	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	Pasar Translama RT.003/001 Dusun 01, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
10	Bantuan Pengadaan Mesin Sablon Listrik (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Karang Taruna Tunas Sakti Dusun 01 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
11	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Karang Taruna Tunas Sakti Dusun 01 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
12	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dusun 01 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
13	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Durian PKK RT.005/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
14	Bantuan Peralatan Pengolahan Aneka Kacang dan Kue Kering	Dasawisma Melati Durian PKK RT.005/001 Translama, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
15	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Pir PKK RT.007/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
16	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Lingkungan RT.007/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
17	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Banana PKK RT.008/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
18	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Banana PKK RT.008/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
19	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Sawo PKK RT.009/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
20	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Melati Sawo PKK RT.009/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik,-rehab kios, -pengecatan)	Pasar Desa Lalapin RT.009/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
22	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma RT.010/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
23	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma RT.010/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
24	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	PKK Desa Lalapin RT.010/002, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
25	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	PKK Desa Lalapin RT.010/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
26	Bantuan Peralatan Pengolahan Aneka Kacang dan Kue Kering	PKK Desa Lalapin RT.010/002, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
27	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma PKK RT.011/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
28	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma PKK RT.011/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
29	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Matahari Jambu RT.013/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
30	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dasawisma Matahari Jambu RT.013/002 Lalapin, Kab. Kotabaru	Hampang	Lalapin				
31	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 02 Desa Limbur, Kab. Kotabaru	Hampang	Limbur				
32	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik,-rehab kios, -pengecatan)	Jl. Eks. Kodeco, Km.84, Salat RT.02, Desa Peramasan Dua Kali Sanga, Kab. Kotabaru	Hampang	Peramasan Dua Kali Sanga				
33	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Eks. Kodeco, Km.84, Hapiring RT.03, Desa Peramasan Dua Kali Sanga, Kab. Kotabaru	Hampang	Peramasan Dua Kali Sanga				
34	Pembangunan Kios Pasar (syarat yang diperlukan: min 5 bh kios uk.20x15m)	RT.4 Desa Magalau Hilir, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Magalau Hilir				
35	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Rt. 001-Rt. 005, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Magalau Hilir				
36	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Magalau Hulu, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Magalau Hulu				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Kecamatan		Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
37	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Magalau Hulu, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Magalau Hulu				
38	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	RT 3 Siahuh, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Siahuh				
39	Pembangunan Kios Pasar (syarat yang diperlukan: min 5 bh kios uk.20x15m)	rt 08, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Siahuh				
40	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	rt 09, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Siahuh				
41	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	desa siahuh, Kab. Kotabaru	Kelumpang Barat	Siahuh				
42	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	Desa Mandala, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Mandala				
43	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Mandala, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Mandala				
44	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik,-rehab kios, -pengecatan)	rt 03, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Pelajau Baru				
45	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	SERONGGA, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Serongga				
46	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	SERONGGA, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Serongga				
47	Pembangunan Kios Pasar (syarat yang diperlukan: min 5 bh kios uk.20x15m)	Jalan Gajah Mada Desa Telagasari, kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten	Kelumpang Hilir	Telagasari				
48	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jalan Gajah Mada Desa Telagasari, kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hilir	Telagasari				
49	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	Desa Bangkalan Dayak Rt 01, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Bangkalan Dayak				
50	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemas Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Bangkalan Dayak, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Bangkalan Dayak				
51	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Cantung Kiri Hilir				
52	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Karang Payau, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Karang Payau				
53	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Karang Payau, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Karang Payau				
54	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Laburan, Kab. Kotabaru	Kelumpang Hulu	Laburan				
55	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik,-rehab kios, -pengecatan)	RT 002, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pantai				
56	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	RT 002, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pantai				
57	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 008, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pantai				
58	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 002, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pantai				
59	Bantuan Pengadaan Peralatan Industri Kerajinan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Rt.01 s/d 04, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pembelacanan				
60	Bantuan Pengadaan Peralatan Industri Kerajinan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Rt.01 s/d 04, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pembelacanan				
61	Bantuan Pengadaan Peralatan Industri Kerajinan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Rt.01 s/d 04, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Pembelacanan				
62	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sukamaju, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Suka Maju				
63	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tanjung Pangga RT. 01 S/D 04, Kab. Kotabaru	Kelumpang Selatan	Tanjung Pangga				
64	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.005 Desa Geronggang, Kab. Kotabaru	Kelumpang Tengah	Geronggang				
65	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sebuli, Kab. Kotabaru	Kelumpang Tengah	Sebuli				
66	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru, Kab. Kotabaru	Kelumpang Tengah	Tebing Tinggi				
67	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Pudi Seberang				
68	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Sulangkit				
69	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	DESA SUNGAI HANYAR RT 02 RW 00 KEC.KELP UTARA, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Sungai Hanyar				
70	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sungai Seluang, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Sungai Seluang				
71	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	desa, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Sungai Seluang				
72	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 03, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Wilas				
73	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 01, Kab. Kotabaru	Kelumpang Utara	Wilas				
74	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk.6x30 m)	jl.desa rt.3, Kab. Kotabaru	Pamukan Barat	Mangka				
75	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Mayangsari Rt 10, Kab. Kotabaru	Pamukan Barat	Mayang Sari				
76	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Mayangsari Rt 13 Kec Pamukan Barat, Kab. Kotabaru	Pamukan Barat	Mayang Sari				
77	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 001/001, Kab. Kotabaru	Pamukan Barat	Sengayam				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Kecamatan		Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
78	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Rt. 01 s/d Rt.05, Kab. Kotabaru	Pamukan Selatan	Mulyodadi				
79	Bantuan Pengadaan Peralatan Kerja Mebel (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Pondok Labu, Kab. Kotabaru	Pamukan Selatan	Pondok Labu				
80	Rehabilitasi Sedang/Berat Toko/Kios/Los Pasar (syarat yang diperlukan: -rehab atap, -peninggian lantai)	RT.01, Kab. Kotabaru	Pamukan Selatan	Sekandis				
81	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk 6x30 m)	Jalan Karya Pembangunan RT 010, Kab. Kotabaru	Pamukan Selatan	Sukadana				
82	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.03 Desa Balaimea, Kab. Kotabaru	Pamukan Utara	Balaimea				
83	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01 Desa Pamukan Indah, Kab. Kotabaru	Pamukan Utara	Pamukan Indah				
84	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.03 Desa Tamiang, Kab. Kotabaru	Pamukan Utara	Tamiang				
85	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.03 Desa Wonorejo, Kab. Kotabaru	Pamukan Utara	Wonorejo				
86	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	DESA GEMURUH RT.002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Gemuruh				
87	Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	DESA GEMURUH RT.001, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Gemuruh				
88	Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan (Kelompok Usaha Ibu Bahagia), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
89	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
90	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan (Karang Taruna Karya Bahari), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
91	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan (Kelompok Usaha Ibu Bahagia), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
92	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan (Kelompok Tukang Berkat Bersama), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
93	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan (Kelompok Tukang Usaha Mandiri), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
94	Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan RT. 05 (Kelompok IRT Rukun Sejahtera), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
95	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Lontar Selatan RT. 01 (Kelompok Usaha Dapur Mama), Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Selatan				
96	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Lontar Timur, RT 01 s/d 06, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Timur				
97	Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Lontar Timur, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Timur				
98	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	JL. A. Yani RT.001 Dusun I Desa Lontar Utara Kecamatan Pulaulaut Barat, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Lontar Utara				
99	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				
100	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				
101	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				
102	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				
103	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				
104	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sebanti				
105	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Semaras RT.005/RW.003, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Semaras				
106	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sepagar, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sepagar				
107	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sumber Sari				
108	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sumbersari Rt 05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Sumber Sari				
109	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Barat	Tapian Balai				
110	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01,02,03 dan 07 Kerayaan Utara, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Kerayaan Utara				
111	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01,02,03,05,06 dan 07 Kerayaan Utara, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Kerayaan Utara				
112	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemas Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 02,04,05 dan 07, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Kerayaan Utara				
113	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	PULAU KERASIAN, RT.03, RT.05, RT.06, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerasian				
114	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	PULAU KERASIAN RT.05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerasian				
115	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	PULAU KERASIAN, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerasian				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Kecamatan		Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
116	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Pulau Kerumputan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Pulau Kerumputan				
117	Bantuan Peralatan Pengolahan Aneka Kacang dan Kue Kering	RT 01,02,03, dan 04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan				
118	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 01,02,03 DAN 04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan				
119	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan				
120	Bantuan Pengadaan Peralatan Membuat Mahar dan Hias Seseheran (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 01,02,03,04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Selatan				
121	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik,-rehab kios, -pengecatan)	Desa Tanjung Lalak Utara RT 05 Dusun 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara				
122	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tanjung Lalak Utara RT 01 Dusun 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara				
123	Pengadaan Peralatan Percetakan	Desa tanjung Lalak Utara RT 04 Dusun 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara				
124	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa tanjung Lalak Utara RT 04 Dusun 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara				
125	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengolahan Arang	Desa Tanjung Lalak Utara RT 01 Dusun 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Tanjung Lalak Utara				
126	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Kemuning RT 03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Teluk Kemuning				
127	Bantuan Pengadaan Peralatan Industri Kerajinan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Kemuning RT 04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Teluk Kemuning				
128	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Kemuning RT 05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Kepulauan	Teluk Kemuning				
129	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sungai Bahim, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Sungai Bahim				
130	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Madarammang RT. 007 RW. 004, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka				
131	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Madarammang RT. 007 RW. 004, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka				
132	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemas Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Madarammang RT. 006 RW. 003, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka				
133	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemas Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Madarammang RT. 006 RW. 003, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka				
134	Pengadaan Peralatan Percetakan	Jl. H. Kanda RT. 002 RW. 001, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Seloka				
135	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tanjung Serudung Rt.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Tanjung Serudung				
136	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01 Desa Teluk Sirih, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Teluk Sirih				
137	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemas Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01 Desa Teluk Sirih, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Selatan	Teluk Sirih				
138	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Bandar Raya, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bandar Raya				
139	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bangun Rejo				
140	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bangun Rejo				
141	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bangun Rejo				
142	Pengadaan Peralatan Percetakan	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Bangun Rejo				
143	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Gosong Panjang, RT 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Gosong Panjang				
144	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Gosong Panjang, RT 03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Gosong Panjang				
145	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Gosong Panjang RT 03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Gosong Panjang				
146	Bantuan Pengadaan Peralatan Kerja Mebel (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Gosong Panjang, RT 03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Gosong Panjang				
147	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Kampung Baru, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Kampung Baru				
148	Bantuan Pengadaan Kulkas Freezer (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jalan Mercusuar RT/RW. 03/02 Desa Tanjung Kunyit Kecamatan Pulaulaut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Kunyit				
149	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tanjung Sungkai Rt 03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Sungkai				
150	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tanjung Sungkai Rt 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Sungkai				
151	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 07, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Tengah				
152	Bantuan Pengadaan Parutan Kelapa dan Mesin Pemas Kelapa (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tanjung Tengah				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Kecamatan		Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
153	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tata Mekar, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Tata Mekar				
154	Bantuan Pengadaan Mesin Sablon Listrik (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Tamiang RT. 06, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Teluk Tamiyang				
155	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Tamiang RT 05, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tanjung Selayar	Teluk Tamiyang				
156	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Raya Tanjung Serdang RT.004 KM.32.5, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tengah	Selaru				
157	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Dusun II (RT.09) Desa Sungaipasir, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Tengah	Sungaipasir				
158	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik,-rehab kios, -pengecatan)	Batu Tunau RT.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Batu Tunau				
159	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Batu Tunau RT.1-2-3, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Batu Tunau				
160	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa karang Sari Indah RT 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Karangsari Indah				
161	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa karang Sari Indah RT 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Karangsari Indah				
162	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jalan raya lintas timur, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Kulipak				
163	Pembangunan Los Pasar (syarat yang diperlukan: min 1 bh los uk 6x30 m)	Desa Langkang Baru RT.002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Langkang Baru				
164	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Langkang Baru RT.002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Langkang Baru				
165	Bantuan Pengadaan Peralatan Industri Kerajinan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Gosong, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Teluk Gosong				
166	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Gosong, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Teluk Gosong				
167	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Gosong Kec. Pulaulaut Timur, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Teluk Gosong				
168	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.004, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Teluk Mesjid				
169	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.03-04, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Timur	Teluk Mesjid				
170	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Putri Jaleha RT. 01 RW. 01 Kelurahan Baharu Selatan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Selatan				
171	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Putri Jaleha Gg. Irama RT. 02 RW. 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Selatan				
172	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. SMP 5 RT. 03 RW. 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Selatan				
173	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Putri Jaleha RT. 10 RW. 01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Selatan				
174	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Putri Jaleha Gg. Aris Munandar RT. 11 RW. 02, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Selatan				
175	Rehabilitasi Sedang/Berat Toko/Kios/Los Pasar (syarat yang diperlukan: -rehab atap, -peninggian lantai)	Jl. Suryaganggawansa RT,09, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Baharu Utara				
176	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jalan gunung sari RT.004/002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Gunung Sari				
177	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jalan gunung sari RT. 001/001, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Gunung Sari				
178	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jalan gunung sari RT. 004/002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Gunung Sari				
179	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Bendungan RT.04 Desa Megasari, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Megasari				
180	Bantuan Pengadaan Alat Pengering Kripik / Kerupuk / Amplang (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl.Titian Beringin Rt.10.Rw.03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Rampa				
181	Bantuan Pengadaan Alat Pengering Kripik / Kerupuk / Amplang (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	desa rampa Rt.09.Rw.03, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Rampa				
182	Bantuan Pengadaan Alat Pengering Kripik / Kerupuk / Amplang (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl.citra Rt.01.Rw.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Rampa				
183	Bantuan Pengadaan Alat Pengering Kripik / Kerupuk / Amplang (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl titian beringin rt.03/01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Rampa				
184	Bantuan Pengadaan Mesin Jahit (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	SARANG TIUNG, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Sarang Tiung				
185	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	KELOMPOK GAIRA A.4 RT. 011, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Sarang Tiung				
186	Bantuan Pengadaan Mesin Sablon Listrik (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Pangeran Hidayat RT.04/RW.01 Desa Sebatung, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Sebatung				
187	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Suryagadama RT.05/RW.02 Desa Sebatung, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Sebatung				
188	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jalan berangas rt.01, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Sigam				
189	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.002, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Tirawan				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Kecamatan		Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
190	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tirawan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Tirawan				
191	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tirawan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Tirawan				
192	Bantuan Pengadaan Alat Pengering Kripik / Kerupuk / Amplang (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Tirawan, Kab. Kotabaru	Pulaulaut Utara	Tirawan				
193	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Belambus, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Balambus				
194	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Belambus, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Balambus				
195	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Belambus, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Balambus				
196	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Belambus, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Balambus				
197	Bantuan Pengadaan Peralatan Membuat Mahar dan Hias Seserahan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Belambus, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Balambus				
198	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengolahan Gula Aren	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Kanibungan				
199	Bantuan Peralatan Pengolahan Aneka Kacang dan Kue Kering	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Kanibungan				
200	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Kanibungan				
201	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengolahan Arang	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Kanibungan				
202	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 01, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Kanibungan				
203	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT. 02, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Kanibungan				
204	Bantuan Pengadaan Alat dan Bahan Pembuat Batik Sasirangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Mandin, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Mandin				
205	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Mandin, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Mandin				
206	Bantuan Pengadaan Peralatan Pertukangan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Rampa, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Rampa				
207	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Rampa, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Rampa				
208	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik, -rehab kios, -pengecatan)	Desa Rampa, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Rampa				
209	Bantuan Pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.01 - RT.05, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Serakaman				
210	Bantuan Pengadaan Alat Catering (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Sungai Bali, Kab. Kotabaru	Pulausebuku	Sungai Bali				
211	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Teluk Sungai, Kab. Kotabaru	Pulausembilan	Teluk Sungai				
212	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.002 RW.001, Kab. Kotabaru	Sampanhahan	Gunung Batu Besar				
213	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT.002 RW.001, Kab. Kotabaru	Sampanhahan	Gunung Batu Besar				
214	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	RT 02, Kab. Kotabaru	Sampanhahan	Rampa Manunggal				
215	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembuat Kue (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sampanhahan, Kab. Kotabaru	Sampanhahan	Sampanhahan				
216	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar (syarat yang diperlukan: -pemasangan keramik, -rehab kios, -pengecatan)	Desa Sukamaju RT 12 RW 002, Kab. Kotabaru	Sampanhahan	Suka Maju				
217	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sungai Betung, Kab. Kotabaru	Sampanhahan	Sungai Betung				
218	Bantuan Pengadaan Alat Perbengkelan (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Sungai Betung, Kab. Kotabaru	Sampanhahan	Sungai Betung				
219	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Jl. Laguna Mandiri 1 KM.13 RT.003 RW.001, Kab. Kotabaru	Sungaidurian	Rantau Jaya				
220	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	jl Laguna Mandiri 1 KM.13 RT.003 RW.001, Kab. Kotabaru	Sungaidurian	Rantau Jaya				
221	Pembangunan Kios Pasar (syarat yang diperlukan: min 5 bh kios uk.20x15m)	Jl. Dahlia, RT.009 RW.003 Desa Terombongsari, Kab. Kotabaru	Sungaidurian	Terobong Sari				
222	Bantuan Pengadaan Pedok / Tenda Beserta Isinya (syarat yang diperlukan: -proposal, -nama kelompok, -alamat, no. hp)	Desa Terombongsari, Kab. Kotabaru	Sungaidurian	Terobong Sari				

Tabel 4.1.
REKAP RINCIAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
SKPD : DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KOTABARU

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Kebutuhan Dana/			Sumber Dana			Target			Kebutuhan Dana/			Sumber Dana			Bertambah dan (- Berkurang) (Rp)	Catatan
							Capaian			Pagu	Indikatif		Capaian			Pagu	Indikatif		Pagu	Indikatif		Capaian				
					NON URUSAN						11,061,938,532									11,262,558,492					200,619,960	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*)		100%			11,061,938,532			100%			11,262,558,492								200,619,960	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*)		100%			414,799,800			100%			464,799,800								50,000,000	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen			238,099,800		3	Dokumen			288,099,800								50,000,000	Pagu Bertambah
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen			8,000,000		1	Dokumen			8,000,000								-	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen			6,000,000		1	Dokumen			6,000,000								-	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen			6,000,000		1	Dokumen			6,000,000								-	
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen			5,000,000		1	Dokumen			5,000,000								-	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan			22,000,000		12	Laporan			12,010,000			-					9,990,000	Pagu Berkurang
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan			129,700,000		3	Laporan			139,690,000								9,990,000	Pagu Bertambah
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*)		100%			7,307,523,393			100%			7,330,615,353								23,091,960	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	Orang/bulan			6,697,351,557		12	Orang/bulan			6,697,351,557								-	
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen			28,951,914		12	Dokumen			48,453,874								19,501,960	Pagu Bertambah
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen			576,720,000		12	Dokumen			580,310,000								3,590,000	Pagu Bertambah
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan			3,499,948		1	Laporan			3,499,948								-	
X	XX	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen			999,974		1	Dokumen			999,974								-	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*)		100%			49,380,000			100%			100,000,000								50,620,000	

Kode Rekening					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah dan (- Berkurang) (Rp)	Catatan
2	17	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	49,380,000		1	Orang	100,000,000	50,620,000	Pagu Bertambah
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*)		100%	906,768,752			100%	1,006,768,752	100,000,000	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	29,941,160		12	Paket	29,941,160	-	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	24,940,869		12	Paket	24,940,869	-	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	516,779,023		12	Paket	491,779,023	- 25,000,000	Pagu Berkurang
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	34,999,700		12	Paket	34,999,700	-	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan	300,108,000		75	Laporan	425,108,000	125,000,000	Pagu Bertambah
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)		100%	47,610,520			100%	85,118,520	37,508,000	
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	47,610,520		4	Unit	85,118,520	37,508,000	Pagu Bertambah
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*)		100%	1,985,800,000			100%	1,925,200,000	(60,600,000)	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5,000,000		12	Laporan	5,000,000	-	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	403,700,000		4	Laporan	356,700,000	- 47,000,000	Pagu Berkurang
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	1,577,100,000		60	Laporan	1,563,500,000	- 13,600,000	Pagu Berkurang
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *)		100%	350,056,067			100%	350,056,067		
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit	154,076,067		4	Unit	154,076,067	-	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	Unit	80,280,000		40	Unit	80,280,000	-	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	115,700,000		1	Unit	115,700,000	-	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4,001,321,490				4,001,321,490		
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT KOPERASI		39.13%	290,000,000			39.13%	290,000,000		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		39.13%	290,000,000			39.13%	290,000,000		

Kode Rekening					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Kebutuhan Dana/			Sumber Dana			Bertambah dan (- Berkurang) (Rp)	Catatan
						Target Capaian			Pagu Indikatif			Target Capaian				
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Unit Usaha	130,000,000			35	Unit Usaha	130,000,000		-
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Unit Usaha	160,000,000			4	Unit Usaha	160,000,000		-
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian		47.62%	100,000,000				47.62%	100,000,000		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian		47.62%	100,000,000				47.62%	100,000,000		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	60	Orang	100,000,000			60	Orang	100,000,000		-
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan		57.14%	90,000,000				57.14%	90,000,000		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah		57.14%	90,000,000				57.14%	90,000,000		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15	Unit Usaha	90,000,000			15	Unit Usaha	90,000,000		-
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil		60.00%	3,111,261,552				60.00%	3,111,261,552		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		60.00%	3,111,261,552				60.00%	3,111,261,552		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	160	Orang	2,738,999,858			160	Orang	2,738,999,858		-
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60	Unit Usaha	159,999,762			60	Unit Usaha	159,999,762		-
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60	Unit Usaha	212,261,932			60	Unit Usaha	212,261,932		DAK NON FISIK - Pergeseran Rincian Belanja
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan		60.00%	410,059,938				60.00%	410,059,938		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha		60.00%	410,059,938				60.00%	410,059,938		

Kode Rekening					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target Capaian			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Sumber Dana			Bertambah dan (- Berkurang) (Rp)	Catatan
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	128	Unit Usaha	410,059,938						128	Unit Usaha	410,059,938								Pergeseran Rincian Belanja
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3,204,095,558									3,204,095,558							
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		88.89%	200,000,000						88.89%		200,000,000								
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		85.00%	100,000,000						85.00%		100,000,000								
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8	Dokumen	100,000,000						8	Dokumen	100,000,000							-	
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		88.89%	100,000,000						88.89%		100,000,000								
3	30	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8	Dokumen	100,000,000						8	Dokumen	100,000,000							-	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan		53.85%	2,509,097,062						53.85%		2,509,097,062								
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		27.69%	2,386,098,104						27.69%		2,386,098,104								
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	2,176,099,736						4	Unit	2,176,099,736							-	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	48	Unit	209,998,368						48	Unit	209,998,368							-	
3	30	03	2.02		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		32.31%	122,998,958						32.31%		122,998,958								
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	50	Dokumen	122,998,958						50	Dokumen	122,998,958							-	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		100%	119,999,567						100%		119,999,567								
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		100%	119,999,567						100%		119,999,567								
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96	Laporan	119,999,567						96	Laporan	119,999,567							-	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar		60%	324,999,847						60%		324,999,847								
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		60%	324,999,847						60%		324,999,847								
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	650	Unit	149,999,860						650	Unit	149,999,860							-	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30	orang	84,999,987						30	orang	84,999,987							-	Menambah Rincian Belanja

Kode Rekening					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Bertambah dan (- Berkurang) (Rp)	Catatan	
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	300	Unit	90,000,000		300	Unit	90,000,000		-	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri		100%	49,999,082			100%	49,999,082			
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100%	49,999,082			100%	49,999,082			
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2	Kali	49,999,082		2	Kali	49,999,082		-	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2,223,000,000.00				2,223,000,000.00			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM		60%	2,103,000,000.00			60%	2,103,000,000.00			
3	31	02	2.01		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase hasil penerapan RPIK yang ditetapkan menjadi perda		60%	2,103,000,000.00			60%	2,103,000,000.00			
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	150,000,000		1	Dokumen	239,000,000		89,000,000	Pagu Bertambah
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	1,533,000,000		1	Dokumen	1,444,000,000		- 89,000,000	Pagu Berkurang
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	420,000,000		1	Dokumen	420,000,000		-	Pergeseran Rincian Belanja
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait		4.39%	20,000,000			4.39%	20,000,000			
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		4.39%	20,000,000			4.39%	20,000,000			
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	20,000,000		1	Dokumen	20,000,000		-	Pergeseran Rincian Belanja
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini		84.00%	100,000,000			84.00%	100,000,000			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas		84.00%	100,000,000			84.00%	100,000,000			
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1	Dokumen	100,000,000		1	Dokumen	100,000,000		-	
									20,490,355,580				20,690,975,540		200,619,960	


PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2023									PENDAPATAN
Unit Pemerintahan : 2.11.01 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Organisasi : 2.11.01.01 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah									
1	2	Sebelum Perubahan Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Sesudah Perubahan Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif /Harga		Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	3	4	5	6 = (3 x 5)
4.	PENDAPATAN				2,427,728,985				2,437,728,985
4.1.	Pendapatan Asli Daerah				2,427,728,985				2,437,728,985
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah				2,197,328,985				2,207,328,985
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum				1,014,801,500				1,024,801,500
4.1.2.01.07.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				96,000,000				96,000,000
	- Retribusi Sampah 12 Bulan x 700 Lembar	10,560	Lembar	5000	52,800,000	10,560	Lembar	5000	52,800,000
	- Retribusi Sampah Harian 360 Hari x 150 Lembar	86,400	Lembar	500	43,200,000	86,400	Lembar	500	43,200,000
4.1.2.01.22.	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios				256,000,000				266,000,000
	- Retribusi Harian Pasar 360 Hari x 250 Lembar	180,000	Lembar	500	90,000,000	180,000	Lembar	500	90,000,000
	- Retribusi Perpanjangan/Balik Nama Pedagang dan Kartu Pedagang.	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	20,000,000	20,000,000
	- Retribusi Pelanggan Listrik	12	Bulan	13,000,000	156,000,000	12	Bulan	13,000,000	156,000,000
4.1.2.01.45.	Retribusi Pengujian alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya				100,000,000				100,000,000
	Retribusi pengujian alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya	1	tahun	100,000,000	100,000,000	1	tahun	100,000,000	100,000,000
4.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA								
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				48,000,000				48,000,000
	- Retribusi Jasa WC Umum / Kamar Mandi	36,000	Lembar	1000	36,000,000	36,000	Lembar	1000	36,000,000
	- Retribusi Jasa Tambat Dermaga	12	Bulan	1,000,000	12,000,000	12	Bulan	1,000,000	12,000,000
4.1.2.02.02.	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan								
	PERTOKOAN LIMBUR RAYA LANTAI I (182 Buah)				326,058,000				326,058,000
	30.000,-/meter								
	- Ukuran 7,92.m 12 Buah x 12 Bulan = 144	144	Lembar	237,600	34,214,400	144	Lembar	237,600	34,214,400
	- Ukuran 5.28m 123 Buah x 12 Bulan = 1.476	1,476	Lembar	158,400	233,798,400	1,476	Lembar	158,400	233,798,400
	- Ukuran 5.75.m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	172,500	4,140,000	24	Lembar	172,500	4,140,000
	- Ukuran 5.52. m 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	165,600	17,884,800	108	Lembar	165,600	17,884,800
	- Ukuran 8.28 m 3 Buah x 12 Bulan = 36	36	Lembar	248,400	8,942,400	36	Lembar	248,400	8,942,400
	- Ukuran 5 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	150,000	1,800,000	12	Lembar	150,000	1,800,000
	- Ukuran 12m 7 Buah x 12 Bulan = 84	84	Lembar	60,000	5,040,000	84	Lembar	60,000	5,040,000
	- Ukuran 15 m 3 Buah x 12 Bulan = 36	36	Lembar	75,000	2,700,000	36	Lembar	75,000	2,700,000
	- Ukuran 6m 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	30,000	3,240,000	108	Lembar	30,000	3,240,000
	- Ukuran 11,25m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	56,250	675,000	12	Lembar	56,250	675,000
	- Ukuran 5,5 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	165,000	1,980,000	12	Lembar	165,000	1,980,000
	- Ukuran 28m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	140,000	1,680,000	12	Lembar	140,000	1,680,000
	- Ukuran 20 m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	100,000	2,400,000	24	Lembar	100,000	2,400,000
	- Ukuran 9,45 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	47,250	567,000	12	Lembar	47,250	567,000
	- Ukuran 7,5m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	37,500	900,000	24	Lembar	37,500	900,000
	- Ukuran 21 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	105,000	1,260,000	12	Lembar	105,000	1,260,000
	- Ukuran 9 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	45,000	540,000	12	Lembar	45,000	540,000
	- Ukuran 5 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	25,000	300,000	12	Lembar	25,000	300,000
	- Ukuran 3 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	15,000	180,000	12	Lembar	15,000	180,000
	- Ukuran 10,6m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	318,000	3,816,000	12	Lembar	318,000	3,816,000
	PERTOKOAN LIMBUR RAYA LANTAI II (144 Buah)				188,743,500				188,743,500
	30.000,-/meter								
	- Ukuran Luas 4,6. m 11 Buah x 12 Bln = 132	100	Lembar	138,000	13,800,000	100	Lembar	138,000	13,800,000
	- Ukuran Luas 5,98.m 4 Buah x 12 Bulan = 48	36	Lembar	179,400	6,458,400	36	Lembar	179,400	6,458,400
	- Ukuran Luas 8,58m 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	257,400	6,177,600	24	Lembar	257,400	6,177,600
	- Ukuran Luas 2,24m 4 Buah x 12 Bulan = 48	36	Lembar	67,200	2,419,200	36	Lembar	67,200	2,419,200
	- Ukuran Luas 8,05m 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	241,500	26,082,000	108	Lembar	241,500	26,082,000
	- Ukuran Luar 7,59m 4 Buah x 12 Bulan = 48	36	Lembar	227,700	8,197,200	36	Lembar	227,700	8,197,200
	- Ukuran Luas 3,83m 53 Buah x 12 Bulan = 636	436	Lembar	114,750	50,031,000	436	Lembar	114,750	50,031,000
	- Ukuran Luas 3,68m 8 Buah x 12 Bulan = 96	72	Lembar	110,400	7,948,800	72	Lembar	110,400	7,948,800
	- Ukuran Luas 5,06m 36 Buah x 12 Bulan = 432	232	Lembar	151,800	35,217,600	232	Lembar	151,800	35,217,600
	- Ukuran Luas 5,52.m 4 Buah x 12 Bulan = 48	36	Lembar	165,375	5,953,500	36	Lembar	165,375	5,953,500
	- Ukuran Luas 5,07m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	151,875	3,645,000	24	Lembar	151,875	3,645,000
	- Ukuran Luas 5,28m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	158,400	1,900,800	12	Lembar	158,400	1,900,800
	- Ukuran Luas 20m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	600,000	7,200,000	12	Lembar	600,000	7,200,000
	- Ukuran Luas 12,5m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	375,000	4,500,000	12	Lembar	375,000	4,500,000
	- Ukuran Luas 5,98m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	227,700	2,732,400	12	Lembar	227,700	2,732,400
	- Ukuran Luas 6m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	180,000	4,320,000	24	Lembar	180,000	4,320,000
	- Ukuran Luas 6m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	90,000	2,160,000	24	Lembar	90,000	2,160,000

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	3	4	5	6 = (3 x 5)
					761,201,980				761,201,980
	BLOK B PERTOKOAN PERMANEN				103,680,000				103,680,000
	15.000/M (192 BUAH)								
	- Ukuran Luas 6 m. 192 Buah x 12 Bln = 2.304	1,152	Lembar	90,000	103,680,000	1,152	Lembar	90,000	103,680,000
	BLOK C PERTOKOAN PERMANEN				263,515,480				263,515,480
	15.000/M (131 Buah)								
	- Ukuran Luas 6 m. 14 Buah x 12 Bulan = 168	168	Lembar	90,000	15,120,000	168	Lembar	90,000	15,120,000
	- Ukuran Luas 8 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	120,000	2,880,000	24	Lembar	120,000	2,880,000
	- Ukuran Luas 8,75 m. 27 Buah x 12 Bln = 324	324	Lembar	131,250	42,525,000	324	Lembar	131,250	42,525,000
	- Ukuran Luas 324 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48	48	Lembar	262,500	12,600,000	48	Lembar	262,500	12,600,000
	- Ukuran Luas 20 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	300,000	7,200,000	24	Lembar	300,000	7,200,000
	- Ukuran Luas 7,5 m. 25 Buah x 12 Bulan = 300	300	Lembar	112,500	33,750,000	300	Lembar	112,500	33,750,000
	- Ukuran Luas 12,5 m. 6 Buah x 12 Bulan = 72	54	Lembar	187,500	10,125,000	54	Lembar	187,500	10,125,000
	- Ukuran Luas 11,25 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	26	Lembar	168,750	4,387,500	26	Lembar	168,750	4,387,500
	- Ukuran Luas 18,75 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	281,250	3,375,000	12	Lembar	281,250	3,375,000
	- Ukuran Luas 35 m. 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	525,000	56,700,000	108	Lembar	525,000	56,700,000
	- Ukuran Luas 20,25 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	20	Lembar	303,750	6,075,000	20	Lembar	303,750	6,075,000
	- Ukuran Luas 22,5 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	337,500	8,100,000	24	Lembar	337,500	8,100,000
	- Ukuran Luas 18,12 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	271,951	2,719,510	10	Lembar	271,951	2,719,510
	- Ukuran Luas 10,12 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	151,800	1,518,000	10	Lembar	151,800	1,518,000
	- Ukuran Luas 10 m. 18 Buah x 12 Bulan = 216	216	Lembar	150,000	32,400,000	216	Lembar	150,000	32,400,000
	- Ukuran Luas 15 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	225,000	2,250,000	10	Lembar	225,000	2,250,000
	- Ukuran Luas 18,12 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	271,875	2,718,750	10	Lembar	271,875	2,718,750
	- Ukuran Luas 6,25 m. 7 Buah x 12 Bulan = 84	70	Lembar	93,750	6,562,500	70	Lembar	93,750	6,562,500
	- Ukuran Luas 36,25 m. 2 Bh x 12 Bulan = 24	20	Lembar	543,750	10,875,000	20	Lembar	543,750	10,875,000
	- Ukuran Luas 9,08 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	136,185	1,634,220	12	Lembar	136,185	1,634,220
	BLOK D PERTOKOAN PERMANEN				112,050,000				112,050,000
	15.000/meter (118 Buah)								
	- Ukuran Luas 4 m. 27 Buah x 12 Bulan = 324	300	Lembar	60,000	18,000,000	300	Lembar	60,000	18,000,000
	- Ukuran Luas 4,8 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48	45	Lembar	84,000	3,780,000	45	Lembar	84,000	3,780,000
	- Ukuran Luas 3 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	20	Lembar	45,000	900,000	20	Lembar	45,000	900,000
	- Ukuran Luas 8 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	120,000	1,200,000	10	Lembar	120,000	1,200,000
	- Ukuran Luas 6 m. 80 Buah x 12 Bulan = 960	940	Lembar	90,000	84,600,000	940	Lembar	90,000	84,600,000
	- Ukuran Luas 4,4 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	66,000	660,000	10	Lembar	66,000	660,000
	- Ukuran Luas 5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	75,000	750,000	10	Lembar	75,000	750,000
	- Ukuran Luas 7,20 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	20	Lembar	108,000	2,160,000	20	Lembar	108,000	2,160,000
	BLOK E PERTOKOAN PERMANEN				123,480,000				123,480,000
	15.000/meter (70 Buah)								
	- Ukuran Luas 3 x 4. 32 Buah x 12 Bulan = 396	385	Lembar	180,000	69,300,000	385	Lembar	180,000	69,300,000
	- Ukuran Luas 3 x 3 m. 20 Buah x 12 Bulan = 228	220	Lembar	135,000	29,700,000	220	Lembar	135,000	29,700,000
	- Ukuran Luas 2 x 2,75. 6 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	82,500	1,980,000	24	Lembar	82,500	1,980,000
	- Ukuran Luas 2,75 x 2 2 Buah 12 Bulan = 24	24	Lembar	123,750	2,970,000	24	Lembar	123,750	2,970,000
	- Ukuran Luas 2 x 3 m. 2 Buah x 12 Bln = 24	24	Lembar	82,500	1,980,000	24	Lembar	82,500	1,980,000
	- Ukuran Luas 3 x 3,25 m. 8 Buah x 12 Bulan = 132	120	Lembar	146,250	17,550,000	120	Lembar	146,250	17,550,000
	BLOK F PERTOKOAN PERMANEN				91,800,000				91,800,000
	15.000/M (170 BUAH)								
	- Ukuran Luas 6 m. 170 Buah x 12 Bln = 2.040	1,020	Lembar	90,000	91,800,000	1,020	Lembar	90,000	91,800,000
	BLOK G PERTOKOAN SEMI PERMANEN				66,676,500				66,676,500
	12.500/meter (125 Buah)								
	- Ukuran Luas 6 m. 25 Buah x 12 Bulan = 300	175	Lembar	75,000	13,125,000	175	Lembar	75,000	13,125,000
	- Ukuran Luas 9 m. 12 Buah x 12 Bulan = 144	108	Lembar	112,500	12,150,000	108	Lembar	112,500	12,150,000
	- Ukuran Luas 5,40 m. 16 Buah x 12 Bln = 192	120	Lembar	67,500	8,100,000	120	Lembar	67,500	8,100,000
	- Ukuran Luas 4,50 m. 8 Buah x 12 Bln = 96	82	Lembar	56,250	4,612,500	82	Lembar	56,250	4,612,500
	- Ukuran Luas 8 m. 5 Buah x 12 Bulan = 60	36	Lembar	100,000	3,600,000	36	Lembar	100,000	3,600,000
	- Ukuran Luas 3,75 m. 14 Buah x 12 Bln = 168	140	Lembar	46,875	6,562,500	140	Lembar	46,875	6,562,500
	- Ukuran Luas 7,5 m. 3 Buah x 12 Bln = 36	30	Lembar	93,750	2,812,500	30	Lembar	93,750	2,812,500
	- Ukuran Luas 4 m. 2 Buah x 12 Bln = 24	20	Lembar	50,000	1,000,000	20	Lembar	50,000	1,000,000
	- Ukuran Luas 5,10 m. 13 Buah x 12 Bln = 156	108	Lembar	63,750	6,885,000	108	Lembar	63,750	6,885,000
	- Ukuran Luas 3,32 m. 6 Buah x 12 Bulan = 72	48	Lembar	29,250	1,404,000	48	Lembar	29,250	1,404,000
	- Ukuran Luas 2,40 m. 14 Buah x 12 Bln = 168	120	Lembar	30,000	3,600,000	120	Lembar	30,000	3,600,000
	- Ukuran Luas 4 m. 5 Buah x 12 Bulan = 60	50	Lembar	32,500	1,625,000	50	Lembar	32,500	1,625,000
	- Ukuran Luas 4,8 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	20	Lembar	60,000	1,200,000	20	Lembar	60,000	1,200,000

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	3	4	5	6 = (3 x 5)
					154,767,600				154,767,600
	BLOK SAYUR BAK SEMI PERMANEN				41,040,000				41,040,000
	7500/Meter (115 Buah)								
	- Ukuran Luas 4 m. 115 Buah x 12 Bln = 1.380	1,368	Lembar	30,000	41,040,000	1,368	Lembar	30,000	41,040,000
	BLOK PASAR SUBUH BANGUNAN SENDIRI								
	6000/meter (114 Buah)				31,200,000				31,200,000
	- Ukuran Luas 4 m. 114 Buah x 12 Bulan = 1.368	1,300	Lembar	24,000	31,200,000	1,300	Lembar	24,000	31,200,000
	BLOK MEUBEL BANGUNAN SENDIRI				17,244,000				17,244,000
	6000/meter (25 Buah)								
	- Ukuran Luas 11,25 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	67,500	1,620,000	24	Lembar	67,500	1,620,000
	- Ukuran Luas 9 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	54,000	1,296,000	24	Lembar	54,000	1,296,000
	- Ukuran Luas 15 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	90,000	1,080,000	12	Lembar	90,000	1,080,000
	- Ukuran Luas 12,5 m. 8 Buah x 12 Bulan = 96	96	Lembar	75,000	7,200,000	96	Lembar	75,000	7,200,000
	- Ukuran Luas 10 m. 5 Buah x 12 Bulan = 60	60	Lembar	60,000	3,600,000	60	Lembar	60,000	3,600,000
	- Ukuran Luas 4,5 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48	48	Lembar	27,000	1,296,000	48	Lembar	27,000	1,296,000
	- Ukuran Luas 6 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	36,000	864,000	24	Lembar	36,000	864,000
	- Ukuran Luas 4 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	24,000	288,000	12	Lembar	24,000	288,000
	WARUNG BANGUNAN SENDIRI 6000/M				21,036,000				21,036,000
	(13 Buah)								
	- Ukuran Luas 24 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48	48	Lembar	144,000	6,912,000	48	Lembar	144,000	6,912,000
	- Ukuran Luas 42 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	252,000	3,024,000	12	Lembar	252,000	3,024,000
	- Ukuran Luas 32 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	192,000	2,304,000	12	Lembar	192,000	2,304,000
	- Ukuran Luas 31,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	189,000	2,268,000	12	Lembar	189,000	2,268,000
	- Ukuran Luas 28 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	168,000	2,016,000	12	Lembar	168,000	2,016,000
	- Ukuran Luas 15 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	90,000	1,080,000	12	Lembar	90,000	1,080,000
	- Ukuran Luas 16 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	22	Lembar	96,000	2,112,000	22	Lembar	96,000	2,112,000
	- Ukuran Luas 10 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	22	Lembar	60,000	1,320,000	22	Lembar	60,000	1,320,000
	WARUNG LETER T BANGUNAN SENDIRI				21,618,000				21,618,000
	6000/meter (20 Buah)								
	- Ukuran Luas 15 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	90,000	2,160,000	24	Lembar	90,000	2,160,000
	- Ukuran Luas 18 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	108,000	1,296,000	12	Lembar	108,000	1,296,000
	- Ukuran Luas 16 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	33	Lembar	96,000	3,168,000	33	Lembar	96,000	3,168,000
	- Ukuran Luas 20 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	33	Lembar	120,000	3,960,000	33	Lembar	120,000	3,960,000
	- Ukuran Luas 4 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	33	Lembar	24,000	792,000	33	Lembar	24,000	792,000
	- Ukuran Luas 7,5 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	22	Lembar	45,000	990,000	22	Lembar	45,000	990,000
	- Ukuran Luas 14 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	84,000	1,008,000	12	Lembar	84,000	1,008,000
	- Ukuran Luas 14,4 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	86,400	1,036,800	12	Lembar	86,400	1,036,800
	- Ukuran Luas 15,2 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	11	Lembar	91,200	1,003,200	11	Lembar	91,200	1,003,200
	- Ukuran Luas 10 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	22	Lembar	60,000	1,320,000	22	Lembar	60,000	1,320,000
	- Ukuran Luas 26 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	11	Lembar	156,000	1,716,000	11	Lembar	156,000	1,716,000
	- Ukuran Luas 16 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	33	Lembar	96,000	3,168,000	33	Lembar	96,000	3,168,000
	WARUNG 12 PERTOKOAN SEMI				22,629,600				22,629,600
	PERMANEN 12.500/meter (14 Buah)								
	- Ukuran Luas 12 m. 10 Buah x 12 Bulan = 120	120	Lembar	150,000	18,000,000	120	Lembar	150,000	18,000,000
	- Ukuran Luas 6 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	75,000	900,000	12	Lembar	75,000	900,000
	- Ukuran Luas 17,9 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24(B.Sendiri)	24	Lembar	107,400	2,577,600	24	Lembar	107,400	2,577,600
	- Ukuran Luas 16 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12(B.Sendiri)	12	Lembar	96,000	1,152,000	12	Lembar	96,000	1,152,000

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	3	4	5	6 = (3 x 5)
					162,779,280				162,779,280
	BUAH KIOS PERMANEN 12.500/M				23,686,080				23,686,080
	(41 Buah)								
	- Ukuran Luas 4 m. 34 Buah x 12 Bulan = 408	408	Lembar	50,000	20,400,000	408	Lembar	50,000	20,400,000
	- Ukuran Luas 4 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48 (B.Sendiri)	48	Lembar	30,000	1,440,000	48	Lembar	30,000	1,440,000
	- Ukuran Luas 13,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12(B.Sendiri)	12	Lembar	81,000	972,000	12	Lembar	81,000	972,000
	- Ukuran Luas 5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12 (B.Sendiri)	12	Lembar	30,000	360,000	12	Lembar	30,000	360,000
	- Ukuran Luas 7,14 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12 (B.Sendiri)	12	Lembar	42,840	514,080	12	Lembar	42,840	514,080
	TARAKAN BANGUNAN SENDIRI 6000/M				18,241,200				18,241,200
	(62 Buah)								
	- Ukuran Luas 5,31 m 2 buah x 12 bln = 24	16	Lembar	31,860	509,760	16	Lembar	31,860	509,760
	- Ukuran Luas 5,36 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	32,160	257,280	8	Lembar	32,160	257,280
	- Ukuran Luas 5,24 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	31,440	754,560	24	Lembar	31,440	754,560
	- Ukuran Luas 5,16 m 2 buah x 12 bln = 24	16	Lembar	30,960	495,360	16	Lembar	30,960	495,360
	- Ukuran Luas 4,44 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	26,640	426,240	16	Lembar	26,640	426,240
	- Ukuran Luas 4,92 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	29,520	472,320	16	Lembar	29,520	472,320
	- Ukuran Luas 5,02 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	14	Lembar	30,120	421,680	14	Lembar	30,120	421,680
	- Ukuran Luas 5 m. 13 Buah x 12 Bulan = 156 bh	104	Lembar	30,000	3,120,000	104	Lembar	30,000	3,120,000
	- Ukuran Luas 21,07 m 1 buah x 12 bln = 12	8	Lembar	126,420	1,011,360	8	Lembar	126,420	1,011,360
	- Ukuran Luas 5,23 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	31,380	251,040	8	Lembar	31,380	251,040
	- Ukuran Luas 5,30 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	31,800	508,800	16	Lembar	31,800	508,800
	- Ukuran Luas 5,61 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	33,660	269,280	8	Lembar	33,660	269,280
	- Ukuran Luas 5,46 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48 bh	32	Lembar	32,760	1,048,320	32	Lembar	32,760	1,048,320
	- Ukuran Luas 5,35 m 1 buah x 12 bln = 12	8	Lembar	32,100	256,800	8	Lembar	32,100	256,800
	- Ukuran Luas 5,22 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	31,320	250,560	8	Lembar	31,320	250,560
	- Ukuran Luas 5,61 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	33,660	269,280	8	Lembar	33,660	269,280
	- Ukuran Luas 5,52 m 1 buah x 12 bln = 12	8	Lembar	33,120	264,960	8	Lembar	33,120	264,960
	- Ukuran Luas 5,20 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	31,200	249,600	8	Lembar	31,200	249,600
	- Ukuran Luas 5,25 m. 10 Buah x 12 Bulan = 120	80	Lembar	31,500	2,520,000	80	Lembar	31,500	2,520,000
	- Ukuran Luas 5,5 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	33,000	792,000	24	Lembar	33,000	792,000
	- Ukuran Luas 4,5 m 1 buah x 12 bln = 12	8	Lembar	27,000	216,000	8	Lembar	27,000	216,000
	- Ukuran Luas 5,58 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	33,480	803,520	24	Lembar	33,480	803,520
	- Ukuran Luas 4,01 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	24,060	192,480	8	Lembar	24,060	192,480
	- Ukuran Luas 20 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	120,000	1,920,000	16	Lembar	120,000	1,920,000
	- Ukuran Luas 10 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	60,000	960,000	16	Lembar	60,000	960,000
	WARUNG 53 PERTOKOAN NON				91,176,000				91,176,000
	PERMANEN 10.000/meter (54 Buah)								
	- Ukuran Luas 12,5 m. 8 Buah x 12 Bulan = 96	96	Lembar	125,000	12,000,000	96	Lembar	125,000	12,000,000
	- Ukuran Luas 14,85 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	148,500	2,376,000	16	Lembar	148,500	2,376,000
	- Ukuran Luas 11,25 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	112,500	2,700,000	24	Lembar	112,500	2,700,000
	- Ukuran Luas 12 m. 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	120,000	12,960,000	108	Lembar	120,000	12,960,000
	- Ukuran Luas 12,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12 (B.Sendiri)	8	Lembar	75,000	600,000	8	Lembar	75,000	600,000
	- Ukuran Luas 18 m. 20 Buah x 12 Bulan = 240	240	Lembar	180,000	43,200,000	240	Lembar	180,000	43,200,000
	- Ukuran Luas 18 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12 (B. Sendiri)	12	Lembar	108,000	1,296,000	12	Lembar	108,000	1,296,000
	- Ukuran Luas 34,20 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	342,000	4,104,000	12	Lembar	342,000	4,104,000
	- Ukuran Luas 13,8 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	138,000	1,104,000	8	Lembar	138,000	1,104,000
	- Ukuran Luas 22,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	225,000	2,700,000	12	Lembar	225,000	2,700,000
	- Ukuran Luas 10,5 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24 (B.Sendiri)	24	Lembar	63,000	1,512,000	24	Lembar	63,000	1,512,000
	- Ukuran Luas 33 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	198,000	1,584,000	8	Lembar	198,000	1,584,000
	- Ukuran Luas 40 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	240,000	2,880,000	12	Lembar	240,000	2,880,000
	- Ukuran Luas 24 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	144,000	1,728,000	12	Lembar	144,000	1,728,000
	- Ukuran Luas 6 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12 (B.Sendiri)	12	Lembar	36,000	432,000	12	Lembar	36,000	432,000
	BLOK PISANG SEMI PERMANEN 7.500/M				10,800,000				10,800,000
	(50 Buah)								
	- Ukuran Luas 4 m. 50 Buah x 12 Bulan = 612	360	Lembar	30,000	10,800,000	360	Lembar	30,000	10,800,000
	BELAKANG POS POLISI (24 BH) 6.000/m				5,454,000				5,454,000
	- Ukuran Luas 3 m. 20 Buah x 12 Bulan = 240	239	Lembar	18,000	4,302,000	239	Lembar	18,000	4,302,000
	- Ukuran Luas 5 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	36	Lembar	30,000	1,080,000	36	Lembar	30,000	1,080,000
	- Ukuran Luas 1 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	6,000	72,000	12	Lembar	6,000	72,000
	EX KANTOR PASAR (37 BH) 6.000/m				13,422,000				13,422,000
	- Ukuran Luas 6 m. 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	36,000	3,888,000	108	Lembar	36,000	3,888,000
	- Ukuran Luas 12 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	72,000	864,000	12	Lembar	72,000	864,000
	- Ukuran Luas 8 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	48,000	576,000	12	Lembar	48,000	576,000
	- Ukuran Luas 4 m. 19 Buah x 12 Bulan = 228	228	Lembar	24,000	5,472,000	228	Lembar	24,000	5,472,000
	- Ukuran Luas 7 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	42,000	504,000	12	Lembar	42,000	504,000
	- Ukuran Luas 10,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	63,000	756,000	12	Lembar	63,000	756,000
	- Ukuran Luas 5 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	22	Lembar	30,000	660,000	22	Lembar	30,000	660,000
	- Ukuran Luas 9,75 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	58,500	702,000	12	Lembar	58,500	702,000

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	3	4	5	6 = (3 x 5)
					103,778,625				103,778,625
	WARUNG 9 (12 BUAH) 6.000/m				15,091,200				15,091,200
	- Ukuran Luas 12 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	72,000	864,000	12	Lembar	72,000	864,000
	- Ukuran Luas 10,8 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	64,800	1,555,200	24	Lembar	64,800	1,555,200
	- Ukuran Luas 16 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	96,000	2,304,000	24	Lembar	96,000	2,304,000
	- Ukuran Luas 36 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	216,000	2,592,000	12	Lembar	216,000	2,592,000
	- Ukuran Luas 18 m. 6 Buah x 12 Bulan = 72	72	Lembar	108,000	7,776,000	72	Lembar	108,000	7,776,000
	BAK WADAI (36 BUAH) 6.000/m				13,392,000				13,392,000
	- Ukuran Luas 5 m. 29 Buah x 12 Bulan = 348	348	Lembar	30,000	10,440,000	348	Lembar	30,000	10,440,000
	- Ukuran Luas 12,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	75,000	900,000	12	Lembar	75,000	900,000
	- Ukuran Luas 4 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	36	Lembar	24,000	864,000	36	Lembar	24,000	864,000
	- Ukuran Luas 7,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	45,000	540,000	12	Lembar	45,000	540,000
	- Ukuran Luas 4,5 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	27,000	648,000	24	Lembar	27,000	648,000
	KIOS DEKAT POS SATPAM (13 Bh) 6.000/m				4,032,000				4,032,000
	- Ukuran Luas 5 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48	48	Lembar	30,000	1,440,000	48	Lembar	30,000	1,440,000
	- Ukuran Luas 4 m. 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	24,000	2,592,000	108	Lembar	24,000	2,592,000
	TUKANG JAHIT PSR ATOM (26 BH) 10.000/M				19,140,000				19,140,000
	- Ukuran Luas 6,38 m. 26 Buah x 12 Bulan = 312	300	Lembar	63,800	19,140,000	300	Lembar	63,800	19,140,000
	PELUNASAN TUNGGAKAN RETRIBUSI PERTOKOAN/ KIOS.	1	Thn	52,123,425	52,123,425	1	Thn	52,123,425	52,123,425
4.1.2.02.02.16	Retribusi Parkir / Penitipan Kendaraan Bermotor				230,400,000				230,400,000
	Blok A Limbur Raya Kotabaru				75,600,000				75,600,000
	- Kend. Roda Empat 15 Buah x 30 Hari x 12 Bulan	7,200	Buah	5,000	36,000,000	7,200	Buah	5,000	36,000,000
	- Kend. Roda Dua 90 Buah x 30 Hari x 12 Bulan	39,600	Buah	1,000	39,600,000	39,600	Buah	1,000	39,600,000
	Pasar Kemakmuran Kotabaru				154,800,000				154,800,000
	- Kend. Roda Empat 15 Buah x 30 Hari x 12 Bulan	7,200	Buah	5,000	36,000,000	7,200	Buah	5,000	36,000,000
	- Kend. Roda 2 (Beratap) 80 Buah x 30 Hr x 12 Bln	39,600	Buah	1,000	39,600,000	39,600	Buah	1,000	39,600,000
	- Kend. Roda 2 Tempat Terbuka 80 Bh x 30 Hr x 12 Bln	39,600	Buah	1,000	39,600,000	39,600	Buah	1,000	39,600,000
	- Kend. Roda 2 (Beratap) 80 Buah x 30 Hr x 12 Bln	39,600	Buah	1,000	39,600,000	39,600	Buah	1,000	39,600,000
JUMLAH					2,427,728,985.				2,437,728,985.

<div>  <div> RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH </div> </div>					
<div> PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2023 </div>					PENDAPATAN
Unit Pemerintahan: 2.11.01 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Organisasi : 2.11.01.01 - DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
4.	PENDAPATAN				2,291,805,560
4.1.	Pendapatan Asli Daerah				2,291,805,560
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah				2,108,205,560
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum				943,801,500
4.1.2.01.07.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				78,000,000
	- Retribusi Sampah 12 Bulan x 700 Lembar	8,400	Lembar	5000	42,000,000
	- Retribusi Sampah Harian 360 Hari x 150 Lembar	72,000	Lembar	500	36,000,000
4.1.2.01.22.	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios				256,000,000
	- Retribusi Harian Pasar 360 Hari x 250 Lembar	180,000	Lembar	500	90,000,000
	- Retribusi Perpanjangan/Balik Nama Pedagang dan Kartu Pedagang.	1	Tahun	10,000,000	10,000,000
	- Retribusi Pelanggan Listrik	12	Bulan	13,000,000	156,000,000
4.1.2.01.45.	Retribusi Pengujiuan alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya				50,000,000
	Retribusi pengujian alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya	1	tahun	50,000,000	50,000,000
4.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA				
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				45,000,000
	- Retribusi Jasa WC Umum / Kamar Mandi	36,000	Lembar	1000	36,000,000
	- Retribusi Jasa Tambat Dermaga	12	Bulan	750,000	9,000,000
4.1.2.02.02.	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan				
	PERTOKOAN LIMBUR RAYA LANTAI I (182 Buah)				326,058,000
	30.000,-/meter				
	- Ukuran 7,92.m 12 Buah x 12 Bulan = 144	144	Lembar	237,600	34,214,400
	- Ukuran 5,28m 123 Buah x 12 Bulan = 1.476	1,476	Lembar	158,400	233,798,400
	- Ukuran 5,75.m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	172,500	4,140,000
	- Ukuran 5,52. m 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	165,600	17,884,800
	- Ukuran 8,28 m 3 Buah x 12 Bulan = 36	36	Lembar	248,400	8,942,400
	- Ukuran 5 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	150,000	1,800,000
	- Ukuran 12m 7 Buah x 12 Bulan = 84	84	Lembar	60,000	5,040,000
	- Ukuran 15 m 3 Buah x 12 Bulan = 36	36	Lembar	75,000	2,700,000
	- Ukuran 6m 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	30,000	3,240,000
	- Ukuran 11,25m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	56,250	675,000
	- Ukuran 5,5 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	165,000	1,980,000
	- Ukuran 28m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	140,000	1,680,000
	- Ukuran 20 m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	100,000	2,400,000
	- Ukuran 9,45 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	47,250	567,000
	- Ukuran 7,5m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	37,500	900,000
	- Ukuran 21 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	105,000	1,260,000
	- Ukuran 9 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	45,000	540,000
	- Ukuran 5 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	25,000	300,000
	- Ukuran 3 m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	15,000	180,000
	- Ukuran 10,6m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	318,000	3,816,000
	PERTOKOAN LIMBUR RAYA LANTAI II (144 Buah)				188,743,500
	30.000,-/meter				
	- Ukuran Luas 4,6. m 11 Buah x 12 Bin = 132	100	Lembar	138,000	13,800,000
	- Ukuran Luas 5,98.m 4 Buah x 12 Bulan = 48	36	Lembar	179,400	6,458,400
	- Ukuran Luas 8,58m 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	257,400	6,177,600
	- Ukuran Luas 2,24m 4 Buah x 12 Bulan = 48	36	Lembar	67,200	2,419,200
	- Ukuran Luas 8,05m 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	241,500	26,082,000
	- Ukuran Luar 7,59m 4 Buah x 12 Bulan = 48	36	Lembar	227,700	8,197,200
	- Ukuran Luas 3,83m 53 Buah x 12 Bulan = 636	436	Lembar	114,750	50,031,000
	- Ukuran Luas 3,68m 8 Buah x 12 Bulan = 96	72	Lembar	110,400	7,948,800
	- Ukuran Luas 5,06m 36 Buah x 12 Bulan = 432	232	Lembar	151,800	35,217,600
	- Ukuran Luas 5,52.m 4 Buah x 12 Bulan = 48	36	Lembar	165,375	5,953,500
	- Ukuran Luas 5,07m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	151,875	3,645,000
	- Ukuran Luas 5,28m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	158,400	1,900,800
	- Ukuran Luas 20m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	600,000	7,200,000
	- Ukuran Luas 12,5m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	375,000	4,500,000
	- Ukuran Luas 5,98m 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	227,700	2,732,400
	- Ukuran Luas 6m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	180,000	4,320,000
	- Ukuran Luas 6m 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	90,000	2,160,000

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
					761,201,980
	BLOK B PERTOKOAN PERMANEN				103,680,000
	15.000/M (192 BUAH)				
	- Ukuran Luas 6 m. 192 Buah x 12 Bln = 2.304	1,152	Lembar	90,000	103,680,000
	BLOK C PERTOKOAN PERMANEN				263,515,480
	15.000/M (131 Buah)				
	- Ukuran Luas 6 m. 14 Buah x 12 Bulan = 168	168	Lembar	90,000	15,120,000
	- Ukuran Luas 8 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	120,000	2,880,000
	- Ukuran Luas 8,75 m. 27 Buah x 12 Bln = 324	324	Lembar	131,250	42,525,000
	- Ukuran Luas 324 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48	48	Lembar	262,500	12,600,000
	- Ukuran Luas 20 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	300,000	7,200,000
	- Ukuran Luas 7,5 m. 25 Buah x 12 Bulan = 300	300	Lembar	112,500	33,750,000
	- Ukuran Luas 12,5 m. 6 Buah x 12 Bulan = 72	54	Lembar	187,500	10,125,000
	- Ukuran Luas 11,25 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	26	Lembar	168,750	4,387,500
	- Ukuran Luas 18,75 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	281,250	3,375,000
	- Ukuran Luas 35 m. 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	525,000	56,700,000
	- Ukuran Luas 20,25 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	20	Lembar	303,750	6,075,000
	- Ukuran Luas 22,5 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	337,500	8,100,000
	- Ukuran Luas 18,12 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	271,951	2,719,510
	- Ukuran Luas 10,12 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	151,800	1,518,000
	- Ukuran Luas 10 m. 18 Buah x 12 Bulan = 216	216	Lembar	150,000	32,400,000
	- Ukuran Luas 15 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	225,000	2,250,000
	- Ukuran Luas 18,12 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	271,875	2,718,750
	- Ukuran Luas 6,25 m. 7 Buah x 12 Bulan = 84	70	Lembar	93,750	6,562,500
	- Ukuran Luas 36,25 m. 2 Bh x 12 Bulan = 24	20	Lembar	543,750	10,875,000
	- Ukuran Luas 9,08 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	136,185	1,634,220
	BLOK D PERTOKOAN PERMANEN				112,050,000
	15.000/meter (118 Buah)				
	- Ukuran Luas 4 m. 27 Buah x 12 Bulan = 324	300	Lembar	60,000	18,000,000
	- Ukuran Luas 4,8 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48	45	Lembar	84,000	3,780,000
	- Ukuran Luas 3 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	20	Lembar	45,000	900,000
	- Ukuran Luas 8 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	120,000	1,200,000
	- Ukuran Luas 6 m. 80 Buah x 12 Bulan = 960	940	Lembar	90,000	84,600,000
	- Ukuran Luas 4,4 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	66,000	660,000
	- Ukuran Luas 5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	10	Lembar	75,000	750,000
	- Ukuran Luas 7,20 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	20	Lembar	108,000	2,160,000
	BLOK E PERTOKOAN PERMANEN				123,480,000
	15.000/meter (70 Buah)				
	- Ukuran Luas 3 x 4. 32 Buah x 12 Bulan = 396	385	Lembar	180,000	69,300,000
	- Ukuran Luas 3 x 3 m. 20 Buah x 12 Bulan = 228	220	Lembar	135,000	29,700,000
	- Ukuran Luas 2 x 2,75. 6 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	82,500	1,980,000
	- Ukuran Luas 2,75 x 2 2 Buah 12 Bulan = 24	24	Lembar	123,750	2,970,000
	- Ukuran Luas 2 x 3 m. 2 Buah x 12 Bln = 24	24	Lembar	82,500	1,980,000
	- Ukuran Luas 3 x 3,25 m. 8 Buah x 12 Bulan = 132	120	Lembar	146,250	17,550,000
	BLOK F PERTOKOAN PERMANEN				91,800,000
	15.000/M (170 BUAH)				
	- Ukuran Luas 6 m. 170 Buah x 12 Bln = 2.040	1,020	Lembar	90,000	91,800,000
	BLOK G PERTOKOAN SEMI PERMANEN				66,676,500
	12.500/meter (125 Buah)				
	- Ukuran Luas 6 m. 25 Buah x 12 Bulan = 300	175	Lembar	75,000	13,125,000
	- Ukuran Luas 9 m. 12 Buah x 12 Bulan = 144	108	Lembar	112,500	12,150,000
	- Ukuran Luas 5,40 m. 16 Buah x 12 Bln = 192	120	Lembar	67,500	8,100,000
	- Ukuran Luas 4,50 m. 8 Buah x 12 Bln = 96	82	Lembar	56,250	4,612,500
	- Ukuran Luas 8 m. 5 Buah x 12 Bulan = 60	36	Lembar	100,000	3,600,000
	- Ukuran Luas 3,75 m. 14 Buah x 12 Bln = 168	140	Lembar	46,875	6,562,500
	- Ukuran Luas 7,5 m. 3 Buah x 12 Bln = 36	30	Lembar	93,750	2,812,500
	- Ukuran Luas 4 m. 2 Buah x 12 Bln = 24	20	Lembar	50,000	1,000,000
	- Ukuran Luas 5,10 m. 13 Buah x 12 Bln = 156	108	Lembar	63,750	6,885,000
	- Ukuran Luas 3,32 m. 6 Buah x 12 Bulan = 72	48	Lembar	29,250	1,404,000
	- Ukuran Luas 2,40 m. 14 Buah x 12 Bln = 168	120	Lembar	30,000	3,600,000
	- Ukuran Luas 4 m. 5 Buah x 12 Bulan = 60	50	Lembar	32,500	1,625,000
	- Ukuran Luas 4,8 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	20	Lembar	60,000	1,200,000

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
					154,767,600
	BLOK SAYUR BAK SEMI PERMANEN				41,040,000
	7500/Meter (115 Buah)				
	- Ukuran Luas 4 m. 115 Buah x 12 Bln = 1.380	1,368	Lembar	30,000	41,040,000
	BLOK PASAR SUBUH BANGUNAN SENDIRI				31,200,000
	6000/meter (114 Buah)				
	- Ukuran Luas 4 m. 114 Buah x 12 Bulan = 1.368	1,300	Lembar	24,000	31,200,000
	BLOK MEUBEL BANGUNAN SENDIRI				17,244,000
	6000/meter (25 Buah)				
	- Ukuran Luas 11,25 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	67,500	1,620,000
	- Ukuran Luas 9 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	54,000	1,296,000
	- Ukuran Luas 15 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	90,000	1,080,000
	- Ukuran Luas 12,5 m. 8 Buah x 12 Bulan = 96	96	Lembar	75,000	7,200,000
	- Ukuran Luas 10 m. 5 Buah x 12 Bulan = 60	60	Lembar	60,000	3,600,000
	- Ukuran Luas 4,5 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48	48	Lembar	27,000	1,296,000
	- Ukuran Luas 6 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	36,000	864,000
	- Ukuran Luas 4 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	24,000	288,000
	WARUNG BANGUNAN SENDIRI 6000/M				21,036,000
	(13 Buah)				
	- Ukuran Luas 24 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48	48	Lembar	144,000	6,912,000
	- Ukuran Luas 42 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	252,000	3,024,000
	- Ukuran Luas 32 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	192,000	2,304,000
	- Ukuran Luas 31,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	189,000	2,268,000
	- Ukuran Luas 28 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	168,000	2,016,000
	- Ukuran Luas 15 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	90,000	1,080,000
	- Ukuran Luas 16 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	22	Lembar	96,000	2,112,000
	- Ukuran Luas 10 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	22	Lembar	60,000	1,320,000
	WARUNG LETER T BANGUNAN SENDIRI				21,618,000
	6000/meter (20 Buah)				
	- Ukuran Luas 15 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	90,000	2,160,000
	- Ukuran Luas 18 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	108,000	1,296,000
	- Ukuran Luas 16 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	33	Lembar	96,000	3,168,000
	- Ukuran Luas 20 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	33	Lembar	120,000	3,960,000
	- Ukuran Luas 4 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	33	Lembar	24,000	792,000
	- Ukuran Luas 7,5 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	22	Lembar	45,000	990,000
	- Ukuran Luas 14 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	84,000	1,008,000
	- Ukuran Luas 14,4 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	86,400	1,036,800
	- Ukuran Luas 15,2 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	11	Lembar	91,200	1,003,200
	- Ukuran Luas 10 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	22	Lembar	60,000	1,320,000
	- Ukuran Luas 26 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	11	Lembar	156,000	1,716,000
	- Ukuran Luas 16 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	33	Lembar	96,000	3,168,000
	WARUNG 12 PERTOKOAN SEMI				22,629,600
	PERMANEN 12.500/meter (14 Buah)				
	- Ukuran Luas 12 m. 10 Buah x 12 Bulan = 120	120	Lembar	150,000	18,000,000
	- Ukuran Luas 6 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	75,000	900,000
	- Ukuran Luas 17,9 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24(B.Sendiri)	24	Lembar	107,400	2,577,600
	- Ukuran Luas 16 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12(B.Sendiri)	12	Lembar	96,000	1,152,000

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
					162,779,280
	BUAH KIOS PERMANEN 12.500/M				23,686,080
	(41 Buah)				
	- Ukuran Luas 4 m. 34 Buah x 12 Bulan = 408	408	Lembar	50,000	20,400,000
	- Ukuran Luas 4 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48 (B.Sendiri)	48	Lembar	30,000	1,440,000
	- Ukuran Luas 13,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12(B.Sendiri)	12	Lembar	81,000	972,000
	- Ukuran Luas 5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12 (B.Sendiri)	12	Lembar	30,000	360,000
	- Ukuran Luas 7,14 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12 (B.Sendiri)	12	Lembar	42,840	514,080
	TARAKAN BANGUNAN SENDIRI 6000/M				18,241,200
	(62 Buah)				
	- Ukuran Luas 5,31 m 2 buah x 12 bln = 24	16	Lembar	31,860	509,760
	- Ukuran Luas 5,36 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	32,160	257,280
	- Ukuran Luas 5,24 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	31,440	754,560
	- Ukuran Luas 5,16 m 2 buah x 12 bln = 24	16	Lembar	30,960	495,360
	- Ukuran Luas 4,44 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	26,640	426,240
	- Ukuran Luas 4,92 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	29,520	472,320
	- Ukuran Luas 5,02 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	14	Lembar	30,120	421,680
	- Ukuran Luas 5 m. 13 Buah x 12 Bulan = 156 bh	104	Lembar	30,000	3,120,000
	- Ukuran Luas 21,07 m 1 buah x 12 bln = 12	8	Lembar	126,420	1,011,360
	- Ukuran Luas 5,23 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	31,380	251,040
	- Ukuran Luas 5,30 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	31,800	508,800
	- Ukuran Luas 5,61 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	33,660	269,280
	- Ukuran Luas 5,46 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48 bh	32	Lembar	32,760	1,048,320
	- Ukuran Luas 5,35 m 1 buah x 12 bln = 12	8	Lembar	32,100	256,800
	- Ukuran Luas 5,22 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	31,320	250,560
	- Ukuran Luas 5,61 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	33,660	269,280
	- Ukuran Luas 5,52 m 1 buah x 12 bln = 12	8	Lembar	33,120	264,960
	- Ukuran Luas 5,20 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	31,200	249,600
	- Ukuran Luas 5,25 m. 10 Buah x 12 Bulan = 120	80	Lembar	31,500	2,520,000
	- Ukuran Luas 5,5 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	33,000	792,000
	- Ukuran Luas 4,5 m 1 buah x 12 bln = 12	8	Lembar	27,000	216,000
	- Ukuran Luas 5,58 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	33,480	803,520
	- Ukuran Luas 4,01 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	24,060	192,480
	- Ukuran Luas 20 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	120,000	1,920,000
	- Ukuran Luas 10 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	60,000	960,000
	WARUNG 53 PERTOKOAN NON PERMANEN 10.000/meter (54 Buah)				91,176,000
	- Ukuran Luas 12,5 m. 8 Buah x 12 Bulan = 96	96	Lembar	125,000	12,000,000
	- Ukuran Luas 14,85 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	16	Lembar	148,500	2,376,000
	- Ukuran Luas 11,25 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	24	Lembar	112,500	2,700,000
	- Ukuran Luas 12 m. 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	120,000	12,960,000
	- Ukuran Luas 12,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12 (B.Sendiri)	8	Lembar	75,000	600,000
	- Ukuran Luas 18 m. 20 Buah x 12 Bulan = 240	240	Lembar	180,000	43,200,000
	- Ukuran Luas 18 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12 (B. Sendiri)	12	Lembar	108,000	1,296,000
	- Ukuran Luas 34,20 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	342,000	4,104,000
	- Ukuran Luas 13,8 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	138,000	1,104,000
	- Ukuran Luas 22,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	225,000	2,700,000
	- Ukuran Luas 10,5 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24 (B.Sendiri)	24	Lembar	63,000	1,512,000
	- Ukuran Luas 33 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	8	Lembar	198,000	1,584,000
	- Ukuran Luas 40 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	240,000	2,880,000
	- Ukuran Luas 24 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	144,000	1,728,000
	- Ukuran Luas 6 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12 (B.Sendiri)	12	Lembar	36,000	432,000
	BLOK PISANG SEMI PERMANEN 7.500/M				10,800,000
	(50 Buah)				
	- Ukuran Luas 4 m. 50 Buah x 12 Bulan = 612	360	Lembar	30,000	10,800,000
	BELAKANG POS POLISI (24 BH) 6.000/m				5,454,000
	- Ukuran Luas 3 m. 20 Buah x 12 Bulan = 240	239	Lembar	18,000	4,302,000
	- Ukuran Luas 5 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	36	Lembar	30,000	1,080,000
	- Ukuran Luas 1 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	6,000	72,000
	EX KANTOR PASAR (37 BH) 6.000/m				13,422,000
	- Ukuran Luas 6 m. 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	36,000	3,888,000
	- Ukuran Luas 12 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	72,000	864,000
	- Ukuran Luas 8 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	48,000	576,000
	- Ukuran Luas 4 m. 19 Buah x 12 Bulan = 228	228	Lembar	24,000	5,472,000
	- Ukuran Luas 7 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	42,000	504,000
	- Ukuran Luas 10,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	63,000	756,000
	- Ukuran Luas 5 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	22	Lembar	30,000	660,000
	- Ukuran Luas 9,75 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	58,500	702,000

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
					85,655,200
	WARUNG 9 (12 BUAH) 6.000/m				15,091,200
	- Ukuran Luas 12 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	72,000	864,000
	- Ukuran Luas 10,8 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	64,800	1,555,200
	- Ukuran Luas 16 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	96,000	2,304,000
	- Ukuran Luas 36 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	216,000	2,592,000
	- Ukuran Luas 18 m. 6 Buah x 12 Bulan = 72	72	Lembar	108,000	7,776,000
	BAK WADAI (36 BUAH) 6.000/m				13,392,000
	- Ukuran Luas 5 m. 29 Buah x 12 Bulan = 348	348	Lembar	30,000	10,440,000
	- Ukuran Luas 12,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	75,000	900,000
	- Ukuran Luas 4 m. 3 Buah x 12 Bulan = 36	36	Lembar	24,000	864,000
	- Ukuran Luas 7,5 m. 1 Buah x 12 Bulan = 12	12	Lembar	45,000	540,000
	- Ukuran Luas 4,5 m. 2 Buah x 12 Bulan = 24	24	Lembar	27,000	648,000
	KIOS DEKAT POS SATPAM (13 Bh) 6.000/m				4,032,000
	- Ukuran Luas 5 m. 4 Buah x 12 Bulan = 48	48	Lembar	30,000	1,440,000
	- Ukuran Luas 4 m. 9 Buah x 12 Bulan = 108	108	Lembar	24,000	2,592,000
	TUKANG JAHIT PSR ATOM (26 BH) 10.000/M				19,140,000
	- Ukuran Luas 6,38 m. 26 Buah x 12 Bulan = 312	300	Lembar	63,800	19,140,000
	PELUNASAN TUNGGAKAN RETRIBUSI PERTOKOAN/ KIOS.	1	Thn	34,000,000	34,000,000
4.1.2.02.02.16	Retribusi Parkir / Penitipan Kendaraan Bermotor				183,600,000
	Blok A Limbur Raya Kotabaru				59,400,000
	- Kend. Roda Empat 15 Buah x 30 Hari x 12 Bulan	5,400	Buah	5,000	27,000,000
	- Kend. Roda Dua 90 Buah x 30 Hari x 12 Bulan	32,400	Buah	1,000	32,400,000
	Pasar Kemakmuran Kotabaru				124,200,000
	- Kend. Roda Empat 15 Buah x 30 Hari x 12 Bulan	5,400	Buah	5,000	27,000,000
	- Kend. Roda 2 (Beratap) 80 Buah x 30 Hr x 12 Bln	32,400	Buah	1,000	32,400,000
	- Kend. Roda 2 Tempat Terbuka 80 Bh x 30 Hr x 12 Bln	32,400	Buah	1,000	32,400,000
	- Kend. Roda 2 (Beratap) 80 Buah x 30 Hr x 12 Bln	32,400	Buah	1,000	32,400,000
JUMLAH					2,291,805,560.